

ELITE DALAM STRUKTUR POLITIK DI BERAU (1942-1959)

Juniar Purba
Yuver Kusnoto
Basuki Wibowo

Balai Pelestarian Nilai Budaya
KERATON SAMBALING
Kalimantan Barat

(1950-1959)





**Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat**

df
10-04-15



**ELITE DALAM STRUKTUR
POLITIK DI BERAU (1942-1959)**



**Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat**



**Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat**



**ELITE DALAM STRUKTUR
POLITIK DI BERAU (1942-1959)**

*Juniar Purba
Yuver Kusnoto
Basuki Wibowo*

**Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat**

KEPEL
press

ELITE DALAM STRUKTUR POLITIK DI BERAU (1942-1959)

© Penerbit Kepel Press

Oleh : Juniar Purba
Yuver Kusnoto
Basuki Wibowo

Desain sampul : Arief Budhi Setyawan

Layout : Tim Kreatif Kepel Press

Cetakan pertama, 2014

Penerbit Kepel Press
Puri Arsita A-6
Jl. Kalimantan Ringroad Utara, Yogyakarta
Telp. : (0274) 884500
Hp. : 081 227 10912
e-mail : amara_books@yahoo.com

Anggota IKAPI

Balai Pelestarian Nilai Budaya

ISBN : 978-602-1228-91-3

Kalimantan Barat

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apa pun, tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.



KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkah dan rahmatNya, penulisan sejarah yang berjudul: *"Elite Dalam Struktur Politik Di Berau (1942-1959) Provinsi Kalimantan Timur"* dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan waktu yang ditentukan. Penulisan ini merupakan salah satu kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Pontianak tahun anggaran 2014.

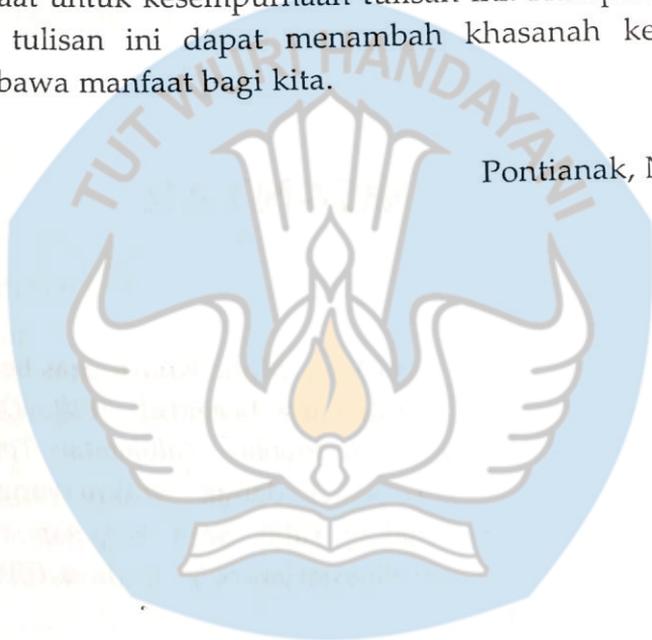
Kegiatan penulisan ini dilakukan untuk menghimpun dan mendokumentasikan tentang Elite pemerintahan yang pernah ada di Berau. Dengan adanya penulisan ini, dapat diketahui bahwa peranan para elite politik Berau pernah ada dan bahkan hingga masa pemerintahan Republik Indonesia. Melalui pengungkapan sejarah ini diharapkan para generasi muda mengetahui, mengambil hikmah dan meneruskan pemikiran yang baik dari sebelumnya.

Penulisan buku tentang *Elite Dalam Struktur Politik DI Berau 1942-1959* ini dapat terwujud dengan adanya kerjasama dan arahan yang baik dari Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Berau, Bapak Sapruddin Ithur, Bp H.Aji Rahmatsyah, Bp Ahmad Maulana, Hj. Aji Putri Kanik Sanipah, Bp Asrul Sani, para informan, rekan-rekan peneliti BPNB dan Ibu Mulyati yang setia mendampingi kami untuk mengumpulkan data. Untuk itu, kepada semua pihak yang telah mendukung penulisan ini, kami ucapkan terima kasih.

Dalam penulisan ini, kami menyadari masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, adanya saran dan kritik sangat bermanfaat untuk kesempurnaan tulisan ini. Harapan kami, semoga hasil tulisan ini dapat menambah khasanah kesejarahan dan membawa manfaat bagi kita.

Pontianak, November 2014

Tim Penulis

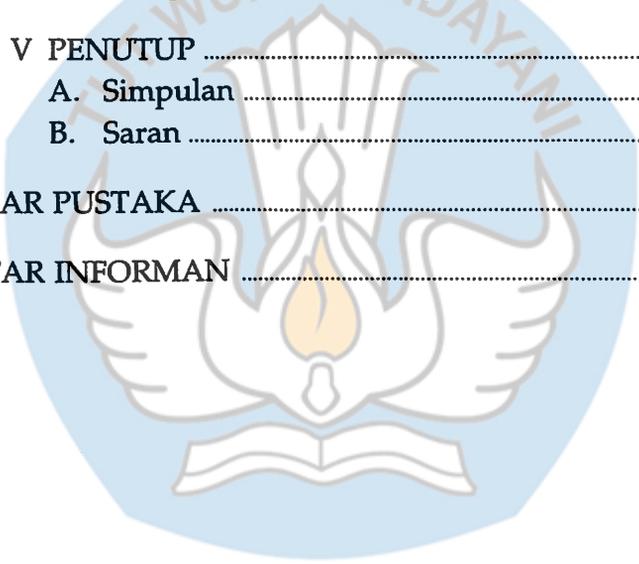


Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Ruang Lingkup	4
E. Tinjauan Penelitian	4
F. Kerangka Konseptual	8
G. Metode Penelitian	10
H. Sitematika Penulisan	11
BAB II DI BAWAH PENGUASA TENTERA CAP JANGKAR	13
A. Penguasa Jepang di Berau	14
B. Sistim Birokrasi Masa Jepang	17
C. Kedudukan Elite Dalam Birokrasi Jepang	22
D. Elite Lokal Dan Akar Rumput Yang Dibungkam	23
BAB III DI ANTARA NICA DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA	25
A. Hari-Hari Singkat Pasca Kemerdekaan	25
B. Perubahan Sistem Pemerintahan	28
C. Melebur ke Negara Kesatuan Republik Indonesia/NKRI	34
D. Kondisi Sosial - Politik di Indonesia Setelah KMB	35
E. Gerakan Pembubaran Negara Federal di Daerah	38

BAB IV DARI FEDERAL MELEBUR KE NKRI	49
A. Konstalasi Politik Nasional	49
B. Proses Perubahan	57
C. Sikap Elite Terhadap Perubahan	59
D. Dampak Perubahan bagi Golongan Elite	66
BAB V PENUTUP	73
A. Simpulan	73
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77
DAFTAR INFORMAN	80



**Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konstelasi politik nasional yang terjadi di Indonesia sekarang ini tidak terlepas dari gagasan-gagasan dari berbagai pihak untuk menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik. Reformasi memberikan peluang yang sangat luas baik secara individu maupun kelompok masyarakat lokal untuk memberikan sumbangsih pemikiran waktu, tenaga, materi dan lain sebagainya guna tercapainya masyarakat yang sejahtera aman dan damai. Bergulirnya undang-undang tentang otonomi daerah menambah warna konstalasi politik nasional, dimana daerah diberikan wewenang untuk memberdayakan potensi yang dimiliki daerah masing-masing. Salah satu implikasi dari otonomi daerah adalah terbentuknya golongan elite penguasa lokal untuk membentuk kultur politik masing-masing.

Kultur politik yang dibentuk oleh kaum elite pada dasarnya terdiri atas kultur yang berorientasi atas nilai pragmatis terutama pada masa orde lama dan orde baru, sikap terhadap tradisi dan perubahan, tingkat militansi, sikap terhadap mobilitas, prioritas kebijaksanaan (Widjaja, 1979:71). Kesemua kultur politik elit yang terbentuk tersebut berdampak pada tatanan kehidupan sejarah politik di Indonesia.

Berbicara mengenai elite politik di Indonesia ada baiknya kita melihat bagaimana dinamika elite dalam lintasan sejarah Indonesia, pada abad ke 19 atau sebelumnya sampai dengan awal abad ke-20 kedudukan elite lokal sangat prestisius. Perpaduan antara patron klien sangat sepadan. Pola pergeseran dan perubahan sekaligus penggolongan peran sosial kaum elite pada masa kolonial berpengaruh kepada tatanan pemerintahan lokal. Golongan elite dikondisikan untuk tidak berhubungan secara baik dengan klien,

kaum elite juga diposisikan sebagai kakitangan penguasa asing sampai tidak memiliki kekuatan. Dalam keadaan seperti ini kaum elite disatu sisi harus mejadi raja kecil di sisi lain juga sebagai perpanjangan tangan pemerintah penguasa (Sutherland. 1979). masuk ke era dimana Jepang menduduki Indonesia, dinamika elite di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan. kaum elite dan masyarakat biasa diperlakukan sama. Keadaan ini memberikan dinamika yang tersendiri dalam sejarah elite birokrasi di Indonesia.

Secara geografis kedudukan dan keberadaan kaum elite birokrasi ini tersebar di berbagai wilayah di Indonesia dan berkedudukan di berbagai posisi, baik sebagai raja, ulama, priyai, cedikiawan, tokoh adat dan lain sebagainya. Persebaran ini berdampak terhadap perbedaaan kultur elit yang ada di dalamnya. Golongan elite yang berkedudukan di kesultanan misalnya, tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, Salah satunya kesultanan yang tersebar di wilayah Borneo.

Dalam sebuah artikel yang ditulis oleh Helius Sjamsudin yang berjudul Kerajaan/Kesultanan Se-Borneo Dalam Dinamika Sejarah (Antara Interaksi Asimetris Dan Simetris; Dependensi Dan Independensi) bahwa Borneo memiliki banyak sekali kerajaan atau kesultanan, baik yang termasuk kedalam *landschap* baru maupun yang tidak termasuk *neo-landschap*.

Ada kurang lebih empat puluhan kesultanan atau kerajaan yang tersebar di seluruh Borneo. Kerajaan atau kesultana tersebut diantaranya adalah Sambas, Mempawah, Pontianak, Kubu, Tanjung Pura, Sukadana, Matan, Simpang-Matan, Kayong-Matan, Landak, Sanggau, Sekadau, Tayan-Meliau, Sintang, Silat, Suhaid, Selimbau, Paisa, Jongkong, Bunut, Belitang, Meliau, Pnoh, Kapuas Hulu, Kota Waringin, Banjarmasin, Kerajaan-Kerajaan Tanah Bumbu: (Cinggal, Manunggul, Sampanahan, Bangkalaan, Canto(U)Ng, Buntar Laut, Batulicin), Pagatan, Kusan, Sabumban, Pulau Laut Dan Pulau Sebuku, Pasir/ Paser, Kutai, Berau, Gunung Tabur, Sambaliung, Bulungan, Tidung, Brunai, Sulu, Sarawak, Sabah.

kultur elit di wilayah ini tentu ada perbedaan-perbedaan dengan kesultanan yang ada di luar pulau Borneo.

Perkembangan dan dinamika setiap kesultanan yang ada di Indonesia, khususnya Kalimantan Timur ini tentu tidak lepas dari peran kaum elite yang berada di dalamnya. Kajian tentang elite ini menarik untuk di teliti. karena luasnya sebaran kesultanan yang ada di wilayah Borneo ini maka penelitian difokuskan pada wilayah Berau Kalimantan Timur.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah proses munculnya kaum elite politik Berau?
2. Bagaimanakah kedudukan elite politik Berau pada masa pendudukan Jepang sampai masa awal mempertahankan kemerdekaan?
3. Bagaimanakah konjungtur politik nasional pada awal kemerdekaan
4. Bagaimana kedudukan dan sikap elite birokrasi Berau ketika melebur menjadi bagian Negara kesatuan Republik Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui bagaimana proses munculnya elite politik Berau
2. Menganalisis kedudukan elit politik Berau pada masa pendudukan Jepang sampai pada masa awal mempertahankan kemerdekaan
3. Mengetahui bagaimana konjungtur politik nasional pada masa awal kemerdekaan

4. Menganalisis kedudukan dan sikap elite birokrasi Berau ketika melebur menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia

D. Ruang Lingkup

Penelitian ini dibatasi oleh dua ruang lingkup yaitu lingkup spasial dan lingkup temporal. Batasan secara spasial dibatasi di wilayah Berau Kalimantan timur. Kajian tentang elite di wilayah ini menarik, apalagi jika dikaitkan dengan dinamika kaum elite yang berlatar belakang kesultanan.

Secara temporal kajian ini diawali sejak pendudukan Jepang di Berau sampai dengan Berau melebur menjadi bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia pada masa orde lama. Meskipun demikian peneliti tidak akan mengabaikan hal yang terjadi baik sebelum atas sesudah dalam batasan waktu penelitian ini.

E. Tinjauan Penelitian

Kajian yang membahas tentang dinamika tentang elite sudah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, Gerry van Klinken misalnya, dalam bukunya *Kembalinya Para Sultan: Pentas Gerakan Komunitarian dalam Politik lokal*, menjelaskan bahwa revolusi nasional 1945 tidak saja berdampak pada penguasa asing, tetapi elit lokal juga menerima dampak. Pada awal 1950an hingga 1960 kekuasaan kerajaan-kerajaan di nusantara telah runtuh, kecuali keraton Yogyakarta. Undang-undang Pokok Agraria 1960 melakukan redistribusi atas tanah-tanah bangsawan. Perlawanan elit kerajaan terhadap pendukung republik atas kedudukan mereka lenyap seiring Orde Baru muncul di panggung politik nasional. Dalam buku ini juga dijelaskan akan adanya kebangkitan-kebangkitan kesultanan setelah masa Orde Baru berakhir.

Kebangkitan kesultanan tidak lepas dari beberapa motif, baik terkait dengan politik, perekonomian maupun eksistensi golongan elite kesultanan itu sendiri. Kebangkitan kesultanan muncul dalam

beberapa bentuk, tergantung pada sejarah para pendahulu mereka. Pertama, mereka dapat tampil dalam bentuk naiknya pamor dari lembaga-lembaga. Kedua, kebangkitan simbolik dari sebuah entitas yang pernah diruntuhkan dan dibiarkan hancur pada 1950an dan 1960an. Ketiga, penemuan kembali secara simbolik sebuah kerajaan yang pernah ada selama berabad-abad.

Buku Sejarah Nasional Indonesia jilid IV yang disusun oleh Sartono Kartodirjo dkk dalam bab I berisi tentang sistim politik dan struktur masyarakat kerajaan-kerajaan tradisional. Buku ini menjelaskan tentang adanya struktur pemerintahan di tiap-tiap kesultanan /kerajaan. Dalam menjalankan pemerintahan, sultan dibantu oleh seorang mangkubumi atau patih yang bertindak sebagai kepala pelaksana pemerintahan. Jabatan ini di pegang oleh bangsawan lingkungan keraton. Dibawah jabatan Mangkubumi terdapat jabatan mantri panganan, mantri pangiwa, mantra bumi dan mantri sikap. Mantri panganan dan mantri pangiwa mempunyai tugas mengurus bidang kemiliteran, sedangkan mantra bumi dan mantri sikap bertugas mengurus perbendaharaan istana dan pemasukan pajak. Selain mereka ada penghulu sebagai pemuka agama dan Patih balit, patih kuwin, patih mulur yang masing-masing bertugas sebagai hakim dalam istana.

Untuk membedakan golongan bangsawan dengan rakyat bawahan, digunakan pelbagai macam lambang ststus, di antaranya yang paling menonjol adalah gelar, baik gelar keturunan maupun gelar jabatan. Dalam birokrasi kerajaan, pemegang jabatan tidak hanya kaum bangsawan tetapi juga dari rakyat biasa. Pejabat atas lebih banyak dikuasai oleh bangsawan, namun tidak menjadi monopoli golongan ini. Jabatan-jabatan tingkat bawah dipangku oleh orang-orang golongan rakyat biasa.

Lambang status tidak hanya dipergunakan dalam gelar kebangsawanan saja, tetapi terdapat macam-macam lambang status yang digunakan untuk mempertajam perbedaan golongan. Kepemilikan tanah, rumah, payung, pengiring dan pakaian juga merupakan simbol pembeda antar golongan. Kekayaan bangsawan berasal dari tanah apanage, bentuk-bentuk rumah bangsawan

seperti bubungan tinggi, limasan berbeda dengan orang kebanyakan. Isi rumah pun menjadi perlambang status, seperti; keris, tombak, benda-benda keperluan upacara, tikar dan lainnya.

Penggunaan pelbagai macam lambang status merupakan pembeda antara raja dan bangsawan dengan rakyat biasa. Hak-hak dan wewenang yang mereka miliki adalah karena tradisi sehingga mereka mendapat fasilitas dalam masyarakat.

Siti Zuhro dalam bukunya yang berjudul Peran aktor dalam Demokratisasi yang diterbitkan oleh Ombak tahun 2009 menjelaskan bahwa dalam masa transisi antara Orde Baru dan Reformasi telah memberikan wadah sekaligus menempatkan para aktor, baik diranah nasional maupun lokal memiliki peran yang lebih dalam hal ini berbeda dengan era politik sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Zuhro mengambil sampel empat propinsi (Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bali) dan empat kabupaten (Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten solok, kabupaten Bone dan kabupaten Gianyar). Buku ini memusatkan perhatian pada interaksi antar aktor dalam dua arena utama yaitu; pertama, interaksi di arena masing-masing (micro politic), kedua, interaksi antar aktor dalam arena yang lebih luas (macro politic). Salah satu arena penting yang bisa digunakan untuk melihat lebih jauh keterlibatan aktor-aktor dalam arena yang lebih luas adalah proses kompetisi politik dan pembuatan kebijakan publik.

Peran elite kerajaan bisa dilihat dalam buku ini dalam pembahasan pemilihan kepala daerah di provinsi Sulawesi Selatan yang di selenggarakan pada November 2007. Ada tiga kerajaan besar yang memiliki pengaruh dalam pemilihan kepala daerah di Sulawesi Selatan, yaitu: Kerajaan Bone, Gowa, dan Luwu. Pasangan Amin Syam dan Mansyur Ramly merupakan representasi dari bangsawan Bone, Syahrul Yasin Limpo dan Agus Arifin Nu'mang mempresentasikan kebangsawanan Gowa, sedangkan Pasangan Asis Qahhar dan Mubyl Handaling di nilai sebagai pewaris Kerajaan Luwu.

Selain menulis buku Peran aktor dalam Demokratisasi yang diterbitkan oleh Ombak tahun 2009, Siti Zuhro juga menulis

buku Demokrasi Lokal. Budaya asli masyarakat Indonesia disatu sisi sangat jauh dari demokrasi. Hal ini bisa dilihat dari sistem pemerintahan zaman dulu yang cenderung bersifat feodalistik, namun sistem demokrasi juga bisa tercermin dalam sistem musyawarah-mufakat. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Zuhro ada relevansinya dengan penelitian yang akan tim teliti. Yaitu tentang bagaimana peran elit lokal yang berasal dari kaum bangsawan didalam perpolitikan, baik level lokal, maupun nasional.

Dalam penelitiannya, terutama di wilayah Sulawesi Selatan, Siti Zuhron menyajikan data tentang adanya peranan yang sangat besar dari para bangsawan dari kertajaan Bone, Gowa, Soppeng. Peran elit lokal dalam demokrasi di wilayah ini bisa dilihat dari betapa dominannya para "andi" yang merupakan keturunan dari para bangsawan-bangsawan di Sulawesi Selatan. Konsep tokoh sentral elit politik tidak lepas dari tokoh raja dan pemimpin. Konsep tokoh tersebut berasal dari dua konsep yang berbeda, yang satu berasal dari kekuatan mutlak yang bersumber dari dewa, sementara yang lain berasal dari kekuasaan yang diberikan melalui perwakilan rakyat. Pola-pola budaya patronase sudah terbentuk di Sulawesi Selatan, terutama pada masa kolonial dan kemerdekaan. Pada masa kolonial muncul elite baru, yakni elite birokrasi dan elite ekonomi.

Pada masa pemerintahan Jepang terjadi pergeseran posisi elite. Sistem birokrasi Jepang yang berorientasi perang merombak sistem Belanda. Elite Lokal (Bangsawan, Birokrasi, Pengusaha) mendapat perlakuan kurang baik pada masa Jepang. Pada tahun 1950-an terjadi perpecahan diantara para elite. Elite keturunan bangsawan terpecah menjadi tiga kelompok, yakni pegawai pemerintahan, pemimpin militer, dan pedagang/pengusaha (Abdullah dalam Jayadin, 2007:142) terjadinya perbedaan pandangan para elite lokal menyebabkan kondisi politik di Sulawesi Selatan pada periode 1950-1956 diwarnai pemberontakan, seperti Darul Islam dan Permesta. Pada tahap selanjutnya adalah para elite lokal meleburkan diri dalam partai politik-partai politik yang ada.

Buku berjudul *Perlawanan dan Perubahan di Kalimantan Barat: Kerajaan Sintang 1822-1942* karangan Helius Sjamsuddin terbitan Ombak tahun 2013 menceritakan kerajaan Sintang dari awal berdirinya, masa Kolonial, hingga Pasca Kolonial. Dalam bukunya Helius Sjamsuddin menjelaskan bahwa Kalimantan (Borneo) memiliki 40an kerajaan/Kesultanan (termasuk Brunai, Sarawak dan Sulu). Letak kesultanan secara geografis terbagi menjadi tiga: Kalimantan Timur menghadap ke Selat Makasar, Kalimantan Selatan menghadap ke arah Laut Jawa, Kalimantan Barat menghadap ke Laut Natuna dan selat Karimata. Buku ini juga menjelaskan adanya pola-pola perlawanan terhadap Belanda. Pola perlawanan terbagi menjadi empat karakteristik atau pola utama, yaitu: pola pertama aristokrat lokal menentang Belanda, pola kedua aristokrat pendatang yang berhasil merekrut penduduk lokal, pola ketiga beberapa kepala sub-etnis Dayak Sintang yang melawan panembahan Sintang dan/atau Belanda, dan pola yang terakhir adalah adanya perlawanan dari masyarakat yang dipimpin kepala suku yang kecewa dan menolak membayar *belasting* (Pajak). Buku yang ditulis oleh Helius menjadi sangat relevan dengan penelitian tentang elit dalam struktur politik Berau tahun 1942-1959.

F. Kerangka Konseptual

1. *Kebangkitan elit politik ala Gerry van Klinken (hal 168)*

Kebangkitan kerajaan-kerajaan muncul dalam beberapa bentuk, tergantung pada sejarah para pendahulu mereka. Pertama, mereka dapat tampil dalam bentuk naiknya pamor dari lembaga-lembaga. Kedua, kebangkitan simbolik dari sebuah entitas yang pernah di runtuhkan dan dibiarkan hancur pada 1950an dan 1960an. Ketiga, penemuan kembali secara simbolik sebuah kerajaan yang pernah ada selama berabad-abad.

Kebangkitan elite keraton dengan cara menaikkan pamor dilakukan oleh kesultanan Yogyakarta dengan cara mendukung revolusi nasional pada 1945, hal ini berbeda dengan keraton

keraton lain. Menaikan pamor agar memiliki nilai tawar bagi elite keraton ternyata tidak saja dilakukan oleh keraton Yogyakarta. Keraton Surakarta, Keraton Mempawah di Kalimantan Barat, keraton Kesepuhan Cirebon, istana Deli Serdang dan Gowa.

Kebangkitan kembali beberapa kesultanan di Kalimantan dan Maluku Utara. Setelah kemerdekaan, keluarga kerajaan tidak lagi mempertahankan tahta. Pemerintah menahan kepala-kepala keluarga kerajaan dari Pontianak dan Ternate pada tahun 1950an karena berpihak kepada Belanda selama revolusi nasional akhir tahun 1940an. Kepala kesultanan Bulungan dan beberapa kerabat kesultanan dibunuh oleh militer Indonesia pada tahun 1964 karena keberpihakan mereka pada Malaysia dan bahkan bangunan kesultanan Bulungan dibakar sehingga rata dengan tanah.

Ada banyak alasan kebangkitan kembali elit kesultanan. Otonomi daerah, politik etnis dan sumber daya alam menjadi salah satu faktor penyebabnya. Bangkit kembali kesultanan Bulungan ternyata bermotif pada adanya ratusan ribu dolar royalti minyak dari ladang minyak Tarakan yang disimpan di Bank Belanda menunggu pihak yang sah dari kesultanan Bulungan. Kebangkitan kesultanan di Kalimantan Barat mempunyai keterkaitan erat dengan politik etnis.

Kebangkitan keraton di Kalimantan Barat mulai muncul pada tahun 2001 berkaitan dengan kebutuhan elite Melayu akan adanya sebuah tempat yang menjadi pusat budaya dalam persaingannya dengan orang Dayak dalam hal kekuasaan politik atas unit-unit administrasi yang baru (van Klinken:2010:174).

Kebangkitan kembali kerajaan tidak terlepas dari adanya keterkaitan politik lokal yang kuat. Sebuah monarki konstitusional di daerah sering kali dapat berpengaruh pada kecenderungan etnis tertentu di dalam kantor Bupati atau Gubernur (van Klinken:2010:171).

G. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian sejarah, oleh karena itu metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian sejarah dengan menggunakan empat langkah, pertama, heuristik, kedua, kritik, ketiga, interpretasi, keempat Historiografi. Langkah-langkah penelitian ini dibagi dalam beberapa tahap, pertama adalah heuristik yaitu melakukan pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian studi sejarah.

a. *Data Primer*

Untuk langkah pertama dalam mengumpulkan data peneliti mengumpulkan Sumber data primer terdiri dari dokumen dan wawancara. Dokumen yang dipergunakan adalah dokumen yang terkait dengan elite dalam struktur politik Berau 1942-1959. Wawancara digunakan mencari data-data terkait dengan peristiwa yang belum terdokumenkan. Wawancara dilakukan terhadap ahli waris kesultanan baik dari Kesultanan Gunung Tabur maupun Kesultanan Sambaliung. Selain itu wawancara juga dilakukan terhadap tokoh masyarakat, ulama maupun orang yang mengetahui tentang objek yang diteliti oleh penulis.

b. *Data Sekunder*

Pengumpulan sumber data sekunder bersumber dari buku-buku referensi, artikel, makalah, majalah koran, sumber internet dan lain-lain. buku-buku yang membahas tentang pengintegrasian kesultanan Berau ke Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan lain-lain. Sumber-sumber ini yang akan dipakai guna melengkapi sumber primer yang telah ada.

Kedua, adalah kritik sumber yaitu menyingkirkan bahan-bahan yang tidak otentik setelah semua sumber yang terkait dengan penelitian terkumpul. Kritik sumber ini dilakukan dengan jalan kritik intern, maupun kritik ekstern, sehingga akan didapatkan data yang valid. Kritik intern dilakukan untuk mencari keaslian

isi sumber, sedangkan kritik ekstern bertujuan untuk mencari keaslian sumber.

Ketiga, adalah penafsiran atau interpretasi terhadap data yang telah dianalisis dalam tahapan kritik sumber. Bisa berupa penafsiran terhadap fakta-fakta yang dimunculkan dari data yang diseleksi menurut urutan waktu dan peristiwa.

Keempat, adalah historiografi atau penulisan sejarah berdasar pada data-data yang sudah diolah melalui tahapan-tahapan tersebut. Historiografi merupakan suatu yang penting dilakukan dalam proses penelitian ataupun penulisan kajian sejarah, karena historiografi merupakan salah satu proses yang penting untuk menyusun penulisan sejarah. Historiografi merupakan bentuk yang berupa sistematika penulisan sejarah sebagai proses akhir dari studi sejarah.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Ruang Lingkup
- E. Tinjauan Penelitian
- F. Kerangka Konseptual
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan

BAB II DIBAWAH PENGUASA TENTERA CAP JANGKAR

- A. Penguasa Jepang Di Berau
- B. Sistem Birokrasi Jepang
- C. Kedudukan Elite Dalam Birokrasi Jepang
- D. Elite Lokal dan Akar Rumput Dibungkam

BAB III DIANTARA NICA DAN NKRI

- A. Hari-Hari Singkat Pasca Kemerdekaan
- B. Perubahan Sistem Pemerintahan
- C. Melebur Ke Negara Kesatuan Republik Indonesia
- D. Kondisi Sosial-Politik Indonesia Setelah KMB
- E. Gerakan Pembubaran Negara Federal Di Indonesia

BAB IV MELEBUR KE NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

- A. Konstelasi Politik Nasional
- B. Proses Perubahan
- C. Sikap Elite Terhadap Perubahan
- D. Dampak Perubahan Bagi Golongan Elite

BAB V. PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

**Balai Pelestarian Nilai Budaya
DAFTAR INFORMAN
Kalimantan Barat**

BAB II

DI BAWAH PENGUASA TENTERA CAP JANGKAR

Kekuatan dan pengaruh agama Syinto baru yang bertumbuh di Jepang mampu dengan cepat untuk mengerahkan kekuatannya dalam menghimpun tenaga dan kekuatannya demi kemajuan dan kesempurnaan kekaisarnya. Kekuatan yang dimiliki Jepang ini diperkuat dengan besarnya jumlah anggota angkatan laut yang mereka miliki dan disukung oleh persenjataan mutakhir yang mereka miliki, apalagi pada saat itu posisi angkatan laut Jepang telah berada pada urutan ke tiga setelah kekuatan Inggris dan Amerika.

Perkembangan Industri yang begitu cepat di Jepang ikut memacu berkembangnya jiwa semangat militer Jepang dan mereka berhasil menguasai Korea (1910) dan ini merupakan langkah awal mereka untuk menginjakkan kaki di Asia. Kemudian pada tahun 1927 negeri Jepang perang dengan Tiongkok Cina dan akhirnya Cina berhasil pada tahun 1939-1945. Pada kancah perang dunia II, Jepang telah ikut maju dan karena kekuatan angkatan laut militernya Jepang dibawah pimpinan Laksamana Yamamoto berhasil menyerang Pearl Harbour, Hawaii tanggal 7 Desember 1941. Tempat ini merupakan pangkalan armada sekutu di Asia Timur (Pasifik).

Terjadinya perang Asia Pasifik antara Jepang dengan sekutu membawa dampak terhadap pendudukan Belanda di Asia termasuk Indonesia. Setelah penyerangan tersebut dan kerajaan Belanda diduduki Jerman maka pemerintahan Belanda menjadi cemas dan Ratu Wilhelmina melalui siaran radio Inggris di London menyatakan sikap untuk berpihak kepada sekutu, karena didalamnya sudah bergabung Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia dan Cina.

Sejak pecahnya perang pasifik, ini menandakan semakin luasnya ekspansi Jepang ke wilayah Asia, termasuk Indonesia. Apalagi menjelang kejatuhan Pemerintah Hindia Belanda, mereka semakin khawatir dan mulai menangkapi anggota-anggota partai yang dianggap pro Jepang. Tetapi, setelah Pemerintah Hindia Belanda menyerahkan kekuasaannya kepada Belanda pada tanggal 1 Maret 1942 di Kalijati, Jawa Barat dan dengan adanya penyerahan kekuasaan ini maka berakhir kekuasaan Belanda di Indonesia.

A. Penguasa Jepang di Berau

Setelah terjadinya perang pasifik, seluruh daerah Hindia Belanda dinyatakan berada dalam keadaan perang (*Staat Van Oorlog en Beleg*) dan akibatnya kegiatan-kegiatan pergerakan rakyat yang sudah berjalan sebelumnya terpaksa dilarang, terlebih kegiatan-kegiatan politik dan bahkan beberapa rumah kediaman tokoh-tokoh pergerakan baik itu di Balikpapan, Samarinda, Tarakan dan kota-kota lainnya digeledah dan bahkan diantaranya ada yang ditahan.

Selain itu, pemerintah Hindia Belanda juga mempersiapkan berbagai upaya untuk melakukan pertahanan jika terjadi penyerangan dari pihak Jepang. Pemerintah Belanda menjadikan pegawainya sebagai militer, sebagai penjaga kota (*staadswacht*), sebagai pembantu polisi (*hulp politie*), sebagai dinas perlindungan udara dan lainnya. Semua ini dilakukan untuk tujuan mendukung pemerintah Belanda jika didalam keadaan darurat dalam menghadapi serangan Jepang (*Dai Nippon*).

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial terhadap rakyat tentu sangat memberatkan, apalagi mereka dipersiapkan bukan untuk kepentingan rakyat tetapi untuk membentengi kekuatan Belanda jika berhadapan dengan Jepang. Rakyat tidak boleh membantah apa yang diperintahkan oleh colonial Belanda karena barang siapa yang tidak patuh dan berani melanggar aturan akan di hukum. Pada satu sisi, tugas itu sangat berat bagi rakyat

Indonesia yang dipekerjakan oleh Belanda apalagi diantara mereka ada dari kalangan tokoh pergerakan yang sudah merasakan hidup dalam penjajahan. Akhirnya, mereka menjadikan tugas itu sebagai pengalaman yang dapat dipergunakan jika menghadapi penjajahan selanjutnya, termasuk penjajahan Jepang dan penjajahan kembali yang dilakukan oleh tentera sekutu NICA.

Ternyata, pecahnya perang Asia Timur Raya merupakan kesempatan baik bagi Jepang. Dengan armada laut, darat dan udara mereka melakukan penyerangan dan pendudukan terhadap negar-negara di Asia termasuk wilayah Hindia Belanda (Indonesia). Jepang juga mempergunakan kesempatan ini untuk propaganda dalam menarik simpati rakyat Indonesia dengan mengatakan bahwa terjadinya perang adalah sebagai upaya Jepang membebaskan rakyat Indonesia dari penjajahan Belanda.

Wilayah Kalimantan Timur termasuk wilayah yang pertama dari kepulauan Indonesia diduduki oleh bala tentera Jepang. Dengan kekuatan angkatan udaranya pada tanggal 30 Desember 1941, pesawat udara Jepang telah menjatuhkan bom di Lapangan terbang Manggar. Kejadian ini sangat mengejutkan tentera kerajaan Hindia Belanda *Koninklijke Nederlands-Indische Leger* (KNIL) yang berada di Balikpapan. Dengan kejadian tersebut penjagaan ketat dilakukan sepanjang siang dan malam guna menjaga agar tidak terjadi pengrusakan oleh serangan-serangan Jepang terhadap sumber-sumber minyak yang ada di Balikpapan, Kalimantan Timur.

Di dalam sejarah tercatat, bahwa kedatangan angkatan laut (*rikugun*) Jepang pertama sekali mendarat di Pulau Tarakan pada tanggal 11 Januari 1942. Kedatangan mereka berasal dari arah utara melalui kepulauan Philippina yang sudah lebih dahulu didudukinya dan ini lebih mempermudah pasukan tentera Jepang mendarat di Pantai Tarakan dan menggempur tentera Belanda yang sudah berada di Pulau Tarakan. Saat itu tentera Jepang berhasil mengalahkan tentera Belanda (KNIL) dan menguasai Kota Tarakan. Serangan tentera Jepang sangat gencar walaupun saat itu tentera Belanda telah mempersiapkan pertahanannya

dengan 4 (empat) buah pesawat tempurnya, tetapi tidak berdaya menghadapi serangan yang dilakukan oleh Jepang. Akibat dari perang tersebut, Tarakan menjadi lautan api dan letusan meriam dari berbagai arah semakin gencar dan mengakibatkan banyak korban jiwa berjatuhan.

Di Tarakan, pasukan tentera *rikugun* Jepang berhasil menangkap 2 (dua) orang tentera Belanda yaitu Kapten Reiderhoff dan kapten Collijn dan kedua orang Belanda ini selanjutnya menggunakan kapal motor dikirim ke Balikpapan sebagai tawanan perang dan membawa ultimatum kepada Komandan Detasemen KNIL di Balikpapan dan selanjutnya Jepang melanjutkan penyerangan yang ditujukan ke wilayah Tanjung Selor dan Tanjung Redeb.

Setelah menguasai Tarakan dan ingin memperluas wilayah kekuasaannya, dengan sebuah kapal landing berukuran kecil yang berisi 2 pleton (sekitar 80 orang) tentera Jepang yang oleh masyarakat Berau disebut serdadu atau tentera *cap jangkar* dan staff sipil mereka bergerak menuju Berau, yang saat itu menjadi kepala pemerintahan Belanda *Hoofd van Plaatselijk Bestuur* (HPB) di Tanjung Redeb adalah *Van der Ploeg* dan beberapa orang Belanda yang bekerja di perusahaan tambang batubara *NV Steenkolen Maatschappij Parapattan (SMP)* di Teluk Bayur.

Sebutan *cap jangkar* diberikan karena pada saat kedatangan tentera Jepang ke Berau, mereka menggunakan pakaian yang bergambar jangkar di bagian lengan dan gambar ini merupakan identitas mereka sebagai tentera angkatan laut Jepang. Setelah menguasai Berau, kegiatan eksploitasi tambang batu bara di Teluk Bayur menjadi dikuasai Jepang dan para pekerja di perusahaan masih menggunakan tenaga kerja yang sebelumnya dipakai oleh pemerintah kolonial Belanda.

Sebagai negara imperialis baru, Jepang sangat membutuhkan bahan-bahan mentah dan kebutuhan tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan industri dan pasar bagi barang-barang industrinya. Pengadaan tenaga kerja dilakukan dengan mempekerjakan para pemuda secara paksa. Mereka ini disebut sebagai *romusha*. Sebagai pekerja, mereka disuruh bekerja tanpa memperhatikan jam kerja

dan kebutuhan makannya. Oleh karena perlakuan Jepang tersebut menyebabkan banyak pekerja kelaparan dan menderita sakit sampai akhirnya meninggal dunia.

Pada masa Jepang kehidupan rakyat Indonesia sangat prihatin dan ini berlaku juga di Berau, Kalimantan Timur. Barang kebutuhan sehari-hari tidak ada dijual di pasar dan keadaan sangat mencekam. Semua organisasi pergerakan dilarang dan selalu menaruh curiga jika ada rakyat yang berkumpul.

B. Sistim Birokrasi Masa Jepang

Berau pernah menjadi pusat pemerintahan kerajaan Berau sebelum pecah menjadi dua kerajaan yaitu kesultanan Gunung Tabur dan Kesultanan Sambaliung. Gunung Tabur merupakan salah satu ibukota kecamatan di Kabupaten Berau, Letaknya di tepi Sungai Segah, Kabupaten Berau. Peninggalan bangunan kesultanan Gunung Tabur hingga saat ini (th 2014) masih ada. Tetapi, sudah merupakan bangunan yang dibangun kembali karena bangunan aslinya terbakar. Sedangkan bangunan keraton Sambaliung masih utuh.

Gunung Tabur pernah menjadi kota Raja (pusat pemerintahan kesultanan Berau) yang dahulu pusat kerajaan Berau ada di Lati (Ulak). Lati merupakan sebuah nama kampung yang disebut Banua, yang sejak abad ke 13 disebutkan telah ada 7 (tujuh) tempat komunitas kehidupan atau 7 (tujuh) Banua. Salah satu adalah Banua Lati. Ketujuh Banua tersebut sepakat membantuk kerajaan dan Banua Lati dipilih sebagai pusat pemerintahan dan rajanya yang pertama adalah *Baddit Di Pattung atau Aji Surya Natakesuma* yang memerintah tahun 1400-1432. Pusat kerajaan Lati berada di sebuah sungai kecil yang letaknya di Kecamatan Gunung Tabur sekarang (A Maulana, 2001: 5).

Dalam sejarah kerajaan Berau yaitu pada masa raja ke 9, yaitu Sultan Aji Dilayas (1644-1673) memiliki 2 (dua) orang istri yang masing-masing melahirkan seorang putera, yaitu Aji Pangeran Tua dan Aji Pangeran Dipati Setelah Aji Dilayas wafat, kedua

orang puteranya ingin menjadi raja menggantikan ayahnya. Karena adanya keinginan kedua putra raja tersebut akhirnya timbul perpecahan dan ini melahirkan kerajaan Gunung Tabur dan Kerajaan Sambaliung. (Catatan Drs A Maulana dan wawancara 11 Maret 2014). Selain kerajaan Berau, sebelum kedatangan Belanda, Jepang dan sekutu di Kalimantan Timur, disana telah ada pemerintahan kerajaan lainnya, seperti kerajaan Kutai, Pasir, dan Bulungan.

Sebagai penguasa tertinggi dalam kerajaan dijabat oleh seorang Sultan atau Raja. Raja memiliki kekuatan dan wewenang untuk mengangkat, memindahkan atau memberhentikan pejabat pemerintahannya oleh karena itu, dalam pelaksanaan tugas pemerintahannya, Raja menunjuk atau mengangkat seorang kepala kampung yang diberi pangkat dan gelar Panglima. Pemberian gelar ini dimaksud untuk menegakkan wibawa dan pengaruh mereka didalam masyarakat. Selain itu, agar para kepala kampung yang mendapat tugas tetap taat dan dapat memberi laporan kepada Raja jika diperlukan.

Sewaktu pemerintahan Hindia Belanda, untuk pengaturan perangkat pemerintahan mulai dari Gubernur Jenderal sampai kedudukan camat dan Kepala Kampung sudah diatur dalam *Indische Staatsregeling* atau Undang-undang tentang susunan Pemerintahan Hindia Belanda *staatsblad* 1925 No 577. Wilayah Kalimantan Timur pemerintahannya bernama *Afdeeling Oost Borneo* yang dipimpin oleh seorang Asisten Residen yang berkedudukan di Banjarmasin dan pememrintahan di Kalimantan Timur saat itu terdiri dari beberapa Kerajaan atau *Zelfbestuur*, seperti Kutai, Pasir, Gunung Tabur dan Sambaliung dan Bulungan.

Pada setiap daerah yang langsung diperintah Belanda disebut dengan wilayah Gubernemen, seperti Samarinda yang juga dikenal dengan wilayah *Vierkante-pal*, sedangkan untuk Tanah Grogot, Tanjung Redeb dan Tanjung Selor disebut dengan Tanah Seribu. Asisten Residen yang di Samarindabertugas untuk wilayah afdeling Kutai dan Pasir, sementara untuk afdeling Bulungan

dan Berau berkedudukan di Tarakan. Sedangkan yang membantu tugas asisten residen adalah *controleur*.

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, kedudukan *Districtshoofd* (wedana) dan *onderdistrictshoofd* (camat) di Kerajaan Kutai dikepalai oleh *Penjawat* dan ini berlaku hingga masa Jepang. Sedangkan untuk wilayah Berau, Gunung Tabur dan Sambaliung dikepalai oleh *Kiai* dan *asisten Kiai*. Tetapi pada masa Jepang sebutannya berubah menjadi *Guncho* untuk *Districtshoofden* dan *Fuku Guncho* untuk *Onder Districtshoofden*. Sebagai pejabat *Guncho* dan *Fuku Guncho* ini terdiri dari pejabat orang-orang-orang Indonesia yang dahulu sudah bekerja pada masa Hindia Belanda.

Pada masa Jepang, seluruh Borneo dibawah kekuasaan angkatan laut yang disebut *Borneo Kaigun Minsebu* yang berpusat di Balikpapan. Untuk wilayah Oost Borneo terdapat 2 (dua) Syu yaitu *Balikipapan Syu* dan *Tarakan Syu*, Pada *Tarakan Syu* membawahi *Tarakan ken* dan *Berau ken*. *Tarakan ken* membawahi *Bulongan Bunken*, *Malinau Bunken* dan *Apokayan Bunken*. Sedangkan *Berau ken* tidak dibagi ke dalam bunken.

Pada masa penguasaan Jepang, bidang pemerintahan tidak banyak mengalami perubahan, karena mereka masih memberlakukan sistim pemerintahan Belanda. Pada masa pemerintah Hindia Belanda, mereka mengangkat Sultan atau raja sebagai kepala swapraja. Sedangkan pada masa Jepang, seorang Raja atau Sultan diharuskan untuk setia kepada penguasa Jepang. Jabatan sultan saat itu hanya sebagai nama, karena Jepang mempunyai alasan bahwa saat itu masih situasi perang sehingga kekuasaan berada di tangan militer dan pemerintahan militer yang berlaku (Oemar Dahlan:2002, 4). Sebagai kepala swapraja mereka diberi gelar *Joo* (Sultan atau Raja) dan daerahnya dinamakan *Kooti* (kerajaan atau kesultanan).

Pada bulan April 1942, pemerintahan kerajaan Sambaliung melakukan perubahan dalam pemerintahannya di Berau, yaitu dengan melakukan perubahan wilayah berupa pemekaran terhadap 2 (dua) *onderdistrict* (kecamatan), yaitu kecamatan Sambaliung dan Kecamatan Talisayan. Selanjutnya Kecamatan Sambaliung

dibagi dalam 2 (dua) *onderdistrict* (kecamatan) yaitu Biduk-biduk dan Muara Lissan. sebagai *onderdistrict* yang baru maka tempat kedudukan kepala *onderdistrict* (Asisten Wedana) berada di Muara Lissan.

Pada masa pemerintahan Jepang, Masing-masing daerah dibagi menjadi beberapa wilayah yang lebih kecil, seperti wilayah Jawa dibagi menjadi 17 Karesidenan (*Syu*) dan diperintah oleh seorang Residen (*Syucokan*). Keresidenan ini terdiri dari kotapraja (*Syi*), kabupaten (*Ken*), kawedanan atau distrik (*Gun*), kecamatan (*Son*), dan desa (*Ku*). Setelah berhasil menduduki Indonesia, pemerintah Jepang mengambil berbagai kebijakan, diantaranya: dalam bidang ekonomi, bidang pemerintahan dan bidang kemiliteran.

Dalam bidang ekonomi, penguasa Jepang mengerahkan sumber daya manusia guna memenuhi kebutuhannya guna membiayai kebutuhan perang dan menekankan agar setiap penduduk menyerahkan harta kekayaannya kepada pemerintahan Jepang, baik itu berupa emas, hewan dan barang-barang berharga lainnya. Kebijakan Jepang ini bukan menjadikan rakyat makmur tetapi semakin menambah kesengsaraan dan penderitaan yang semakin parah..

Pada masa Jepang, sistim pemerintahan di Indonesia menggunakan sistim pemerintahan militer Jepang. Semua dikendalikan atas petunjuk kemiliteran dan saat itu pemerintahan dibagi menjadi beberapa bagian. Wilayah Jawa dan Madura dipusatkan di Jakarta (Batavia), wilayah Sumatera pusatnya di Bukit Tinggi (Sumbar). Dalam bidang pemerintahan untuk Indonesia bagian Timur diperintah oleh tentera Angkatan Laut (*Minseibu*) yang berpusat di Makassar (Sulsel) dan daerah kekuasaannya yaitu Kalimantan, Sulawesi dan Seram (Maluku dan Papua) Masing-masing daerah itu dibagi menjadi beberapa karesidenan, kabupaten, sub-kabupaten (*Bunken*), distrik, dan kecamatan.

Pemerintahan Militer di Berau tidak berlangsung lama karena setelah selesai operasi pengaturan wilayah kemudian diserahkan kepada pemerintahan sipil yaitu kantor pemerintahan Jepang (*Bunken Kanrikan*) dan melantik Tuan Kinosita dengan jabatan

Kanrikan, pangkat yang sama dengan Kepala Pemerintahan Setempat. Dalam bidang pemerintahan tidak banyak perubahan. Sebagai langkah pertama yang dilakukan oleh pemerintahan sipil Jepang adalah mengganti mata uang Belanda dari pecahan F.5.00, F. 2.50, F.1.00, F.0.50, F.0.25, F.0.10. F.0.05, F.0.025, F.0.025, F.0.01, F.0.005. F artinya Rupiah (Belanda menyebutnya Gulden). Pecahan 5 gulden terbuat dari uang kertas, nilai 2.5 gulden sampai nilai 10 cent terbuat dari nikel dan nilai 2,5 cent samapai nilai 0.5 cent terbuat dari logam tembaga. (A.Adriansyah,1982:113)

Dalam kebijakannya, Jepang mengumumkan semua mata uang Belanda harus ditukar dengan uang Jepang yang semuanya terbuat dari uang kertas dan tidak diperbolehkan rakyat menyimpan uang Belanda. Jika ketahuan menyimpan maka dianggap masih berpihak kepada Belanda. Apabila ketahuan maka akan ditangkap dan mendapat hukuman berat seperti dihukum bunuh dan potong kepala dan badan yang menangani masalah pelanggaran disebut *Kempetai* (Korps Polisi Militer). Badan ini sangat ditakuti dan terkenal kejam.

Dalam bidang militer, sejak awal propagandanya Jepang sudah berusaha untuk menarik perhatian rakyat Indonesia agar ikut membantu pemerintah Jepang dalam menghadapi peperangan melawan Sekutu. Para pemuda Indonesia dilibatkan dalam berbagai organisasi kemiliteran, diantaranya sebagai: *Heiho* (pembantu prajurit Jepang) dan ini menjadi bagian Angkatan Laut maupun Angkatan Darat Jepang. Para anggota *Heiho* mendapat latihan kemiliteran dari bagian intelijen militer Jepang baik dalam menggunakan senjata, mengemudi tank dan lainnya. Selain itu, Jepang memilih orang Indonesia untuk membantu pemerintahannya dan ini sesuai dengan propagandanya yg menyatakan bahwa Jepang adalah sebagai saudara tua yang ingin membebaskan saudara mudanya dari penjajahan.

C. Kedudukan Elite Dalam Birokrasi Jepang

Pada masa pemerintahan Jepang tidak banyak yang dapat dilakukan oleh pemerintahan kerajaan. Padahal di saat pertama datang di wilayah Asia, termasuk Kalimantan Timur, rakyat sangat percaya dengan semboyan 3 A Jepang, yaitu Jepang pemimpin Asia, Jepang cahaya Asia, dan Jepang pelindung Asia. Semboyan ini berhasil menarik simpati rakyat dan mereka datang tidak mendapat perlawanan.

Pada masa pemerintahan Jepang terjadi pergeseran posisi elite. Sistem birokrasi Jepang yang berorientasi perang merombak sistem Belanda. Elite Lokal (Bangsawan, Birokrasi, Pengusaha) mendapat perlakuan kurang baik pada masa Jepang. Pada tahun 1950-an terjadi perpecahan diantara para elite. Elite keturunan bangsawan terpecah menjadi tiga kelompok, yakni pegawai pemerintahan pemimpin militer, dan pedagang/pengusaha (Abdullah dalam Jayadinas, 2007:142) terjadinya perbedaan pandangan para elite lokal menyebabkan kondisi politik di Sulawesi Selatan pada periode 1950-1956 diwarnai pemberontakan, seperti Darul Islam dan Permesta. Pada tahap selanjutnya adalah para elite lokal meleburkan diri dalam partai politik-partai politik yang ada.

Kekuasaan Sultan baik dari kesultanan Sambaliung maupun kesultanan Gunung Tabur tetap dipertahankan oleh Jepang. Mereka dijadikan simbol pemersatu masyarakat. Sultan dijadikan mitra kerja untuk mendapatkan informasi dari masyarakat dan dari Sultan juga didapatkan akses untuk berhubungan dengan masyarakat.

Dalam bidang sosial, terutama bidang pendidikan. Pada zaman Jepang, pendidikan mengalami perubahan. Semua warga tanpa membedakan status sosial dapat mengikuti sekolah dasar. Pendidikan ini ditempuh selama enam tahun. Selain itu ada juga sekolah yang setaraf dengan SMP sekarang yaitu *Shoto Ch Gakko* (SMP) dan ada sekolah seperti kejuruan seperti Sekolah Pertukangan (*Kogyo Gakko*) dan Sekolah Teknik Menengah (*Kogyo Sermon Gakko*).

Di Tanjung Redeb setelah Jepang masuk mereka juga meneruskan untuk menguasai pusat perekonomian Kolonial Belanda di Teluk Bayur. Letak Teluk Bayur ini strategis dapat dijangkau dengan menggunakan transportasi darat (10 km) dari Tanjung Redeb dengan menggunakan transportasi sungai/air. Kota ini letaknya di tepi Sungai Segah. Usaha tambang di Teluk Bayur dibangun sejak tahun 1912 oleh pemerintah Kolonial Belanda. Nama perusahaannya adalah *Steinkollen Matschahappy Prapatan (SMP)*. Guna menunjang kehidupan di sekitar perusahaan, berbagai sarana dan fasilitas dibangun oleh pemerintah kolonial pada saat itu, seperti gedung bioskop, kantor SMP dan rumah sakit dan lapangan sepakbola. Semua peninggalan perusahaan ini masih ada di Teluk Bayur.

Menurut informasi yang diperoleh, sebutan Teluk Bayur diberikan karena daerah itu berada di Teluk dan sekitarnya banyak tumbuh pohon kayu bayur. Sebagai wilayah perusahaan, penduduk di Teluk Bayur beragam. Selain orang Belanda, saat itu Teluk Bayur didominasi oleh penduduk yang bersal dari Pulau Jawa. Mereka ini dahulu didatangkan sebagai tenaga kerja diperusahaan. Namun ada juga orang Ambon, Cina, orang Manado. Dalam penempatannya, mereka ditempatkan sesuai dengan tempat asalnya, sehingga di sana ada nama kampung seperti kampung Manado, kampung Jawa dan kampung Cina.

D. Elite Lokal Dan Akar Rumput Yang Dibungkam

Kehadiran tentera Jepang di Berau tidak banyak mengalami perubahan dari penguasa sebelumnya. Mereka hanya meneruskan apa yang telah dilakukan oleh kolonial Belanda. Terhadap para elite lokal yaitu Sultan, dan orang-orang pintar tidak ada yang berubah. Mereka hanya dijadikan sebagai penonton dan dianggap orang yang berpengaruh dalam mengatur warganya.

Selama masa pemerintahan Jepang, hubungan dengan dunia luar tidak ada yang dapat dilakukan. Para elite politik tidak diberi kebebasan dalam mengatur wilayahnya. Kegiatan perekonomian

semakin merosot, barang kebutuhan sehari-hari sulit dipenuhi dan tidak ada di pasaran. Apalagi keadaan saat itu sangat mencekam, tidak ada aktifitas masyarakat apalagi pada tentera Jepang selalu hilirmudik mengamati situasi sehingga penduduk menjadi takut keluar rumah.

Pada bulan Juli 1945 Tentera Jepang di Borneo menyerah pada Sekutu dan Belanda kembali memerintah di wilayah ini, dan dikenal dengan sebutan NICA (*Nederlands Indies Civil Administration* /Pemerintah sipil Hindia Belanda). Belanda membagi wilayah Borneo dalam 3 Residentie yaitu; *Zuid Borneo (Borneo Selatan)*, *Oost Borneo (Borneo Timur)*, dan *West Borneo (Borneo barat)* dengan letak Resident di Banjarmasin, Samarinda, Pontianak. Hal ini berdasarkan pada Staatsblad 1946 Nomor.64 yang berlaku mulai pada tanggal 1 Januari 1946.

Penjajahan silih berganti, setelah mengakui kekalahannya di wilayah Asia maka dilanjutkan dengan penguasaan tentera Jepang yang dimulai sejak tahun 1942. Kehadiran Jepang di wilayah Berau membawa penderitaan dan kehidupan yang sangat prihatin. Terlebih pada masa Jepang, kehidupan masyarakat Berau sengsara, bahan pangan susah dicari dan tidak ada dijual di pasar. Oleh karenanya, penduduk terpaksa melakukan usaha berkebun dan pertanian.

Kedatangan tentera sekutu di wilayah Asia ingin melucuti dan mengusir tentera Jepang yang masih berdiam di Berau. Pesawat udara tentera Inggris dan Amerika menjatuhkan selebaran yang mengatakan bahwa mereka ingin melakukan perlawanan terhadap Jepang. Pada saat itu, mereka masuk melalui Tanjung Redeb, Gunung Tabur, Sambaliung dan Teluk Bayur. Teluk Bayur menjadi sasaran utama sehingga di sana banyak bangunan yang hancur terkena ledakan peluru. Sedangkan kerajaan Sambaliung terhindar dari bom dan yang kena sasaran adalah mesjid, sehingga bangunannya hancur dan musnah. Akibatnya kedudukan Jepang semakin lemah dan pejabat-pejabat Jepang yang masih berada di Berau mulai meninggalkan Berau dan melarikan diri ke Tarakan.

BAB III

DI ANTARA NICA DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

A. Hari-Hari Singkat Pasca Kemerdekaan

Setelah Indonesia menyatakan diri merdeka bukan berarti penjajahan di Indonesia berakhir. Belanda sepertinya masih memiliki keinginan yang kuat untuk mengembalikan kekuasaan yang sudah ditanamkan sebelumnya.

Sesuai dengan perjanjian Wina pada tahun 1942, bahwa negara-negara sekutu bersepakat untuk mengembalikan wilayah-wilayah yang kini diduduki Jepang pada pemilik koloninya masing-masing bila Jepang berhasil diusir dari daerah pendudukannya. Menjelang akhir perang, tahun 1945, sebagian wilayah Indonesia telah dikuasai oleh tentara Sekutu. Satuan tentara Australia telah mendaratkan pasukannya di Makasar dan Banjarmasin, sedangkan Balikpapan telah diduduki oleh Australia sebelum Jepang menyatakan menyerah kalah. Sementara Pulau Morotai dan Irian Barat bersama-sama dikuasai oleh satuan tentara Australia dan Amerika Serikat di bawah pimpinan Jenderal Douglas MacArthur, Panglima Komando Kawasan Asia Barat Daya (*South West Pacific Area Command/SWPAC*).

Setelah perang usai, tentara Australia bertanggung jawab terhadap Kalimantan dan Indonesia bagian Timur, Amerika Serikat menguasai Filipina dan tentara Inggris dalam bentuk komando SEAC (*South East Asia Command*) bertanggung jawab atas India, Burma, Srilanka, Malaya, Sumatra, Jawa dan Indocina. SEAC dengan Panglima Lord Mountbatten sebagai Komando Tertinggi Sekutu di Asia Tenggara bertugas melucuti bala tentera Jepang dan mengurus pengembalian tawanan perang dan tawanan warga sipil sekutu (*Recovered Allied Prisoners of War and Internees/RAPWI*).

Berdasarkan *Civil Affairs Agreement*, pada 23 Agustus 1945 Inggris bersama tentara Belanda mendarat di Sabang, Aceh, dan pada tanggal 15 September 1945, tentara Inggris selaku wakil Sekutu tiba di Jakarta yang didampingi oleh Dr. Charles van der Plas, wakil Belanda pada Pihak Sekutu di Perang Dunia II. Kehadiran tentara Sekutu ini, diboncengi NICA (*Netherland Indies Civil Administration* - pemerintahan sipil Hindia Belanda) yang dipimpin oleh Dr. Hubertus J van Mook, ia dipersiapkan untuk membuka perundingan atas dasar pidato siaran radio Ratu Wilhelmina tahun 1942 (*statkundige concepti* atau konsepsi kenegaraan), tetapi ia mengumumkan bahwa ia tidak akan berbicara dengan Soekarno yang dianggapnya telah bekerja sama dengan Jepang.

Pidato Ratu Wilhemina itu menegaskan bahwa di kemudian hari akan dibentuk sebuah persemakmuran yang diantara anggotanya ialah Kerajaan Belanda dan Hindia Belanda, di bawah pimpinan Ratu Belanda. Dukungan juga kuat dari militer Australia yang ditugasi Sekutu untuk mengamankan kawasan tersebut terhadap Belanda. Oleh karena itu, para pejabat *Netherlands Indies Civil Administration* (NICA) dengan leluasa dapat masuk ke wilayah Sulawesi dengan membonceng pasukan Sekutu, termasuk pasukan pelopor yang mendarat di Makassar 21 September 1945. Mereka itulah yang kemudian membebaskan semua tahanan Sekutu di Sulawesi Selatan dan menempatkan sekitar 3000 orang Belanda bekas tahanan Jepang kembali ke Makassar. Keadaan itu memang berbeda dengan tindakan pasukan Inggris di Jawa yang tidak leluasa karena khawatir membahayakan keselamatan tahanan dan tawanan perang yang banyak jumlahnya. Pasukan Australia di Sulawesi relatif bebas untuk berurusan dengan pasukan Jepang ataupun dengan bekas pejabat lokal.

Tujuan utama mereka adalah mendirikan pemerintahan yang dapat menjamin ketertiban umum dan mendapatkan beras dari daerah pedalaman bagi kebutuhan pangan penduduk Makassar. Untuk itu mereka segera mengangkat para pejabat Belanda sebelum Perang Dunia II. Beberapa diantaranya adalah interniran yang baru saja dibebaskan dari kamp tahanan Jepang, sebagai pejab

sementara pemerintahan sipil. Kondisi itu segera dipergunakan Belanda untuk membanjiri daerah-daerah yang diduduki Pasukan Australia dengan pasukan Belanda dan bekas pegawai pamong praja (*Corps Binneland Bestuur*), seperti residen, asisten residen, kontrolir atau jabatan lainnya. Dengan demikian sesungguhnya tentara Australia telah bekerja untuk kepentingan Belanda.

Dukungan terang-terangan pasukan sekutu (Australia) terhadap Belanda dapat diketahui dari maklumat Panglima Tentara Australia di Makassar Brigadir Jendral Chilton pada tanggal 29 Oktober 1945 yang isinya sangat menekan gerakan pemuda pendukung proklamasi kemerdekaan. Salah satu isinya adalah melarang orang memakai seragam militer atau uniform lain, selain anggota pasukan Sekutu atau polisi. Selain itu, dalam maklumat itu juga melarang penduduk untuk mengikuti latihan militer, memakai atau mempunyai segala macam senjata api dan senjata tajam, mengadakan pawai atau pertunjukan, dan sebagainya. Lebih lanjut Jendral Chilton bahkan telah melarang Gubernur Sulawesi saat itu Dr. G.S.S.J. Ratulangi untuk menjalankan tugasnya, karena pemerintahan sipil telah dijalankan oleh NICA dengan tanggung jawab dan perlindungan tentara Australia yang bertindak sebagai kesatuan Sekutu. Apabila perintah itu dilanggar oleh Dr. G.S.S.J. Ratulangi maka terhadapnya akan diambil tindakan penahanan.

Posisi Belanda semakin kuat dengan diijinkannya Pemerintah Belanda menempatkan seorang berpangkat *Chief Commanding Officer* NICA (Chief Co-NICA) di Morotai mendampingi Panglima Tertinggi Tentara Australia. Chief Co-NICA ini mempunyai wewenang seluruh wilayah Indonesia Timur dan Kalimantan (kecuali Bali). Selain itu dia juga membawahi semua petugas NICA yang ada di Indonesia Timur dan ini merupakan kesempatan yang diberikan oleh Pasukan Australia.

Belanda dalam waktu singkat berhasil mengembalikan fungsi aparat pemerintahannya di wilayah Indonesia bagian timur. Semuanya itu jelas mempunyai pengaruh atas perkembangan politik di wilayah yang bersangkutan. Oleh karena dengan persiapan matang itulah, maka secara politis wilayah Sulawesi, Nusa

Tenggara dan Maluku yang kemudian disebut sebagai Indonesia Timur menjadi salah satu daerah yang secara politis cukup kuat untuk menjadi semacam daerah yang berdiri sendiri terpisah dengan Pemerintah Republik Indonesia di Yogyakarta. Hal itulah yang menyebabkan Negara Indonesia Timur (NIT) dapat bertahan lama menjadi daerah bagian dalam wilayah federal Republik Indonesia Serikat (RIS).

Tanggal 16 September 1945 tentara Australia mendarat di Samarinda. Masyarakat Berau baru mengetahui kalau Indonesia sudah merdeka. Namun karena waktu itu Belanda sudah kembali masuk dan pemerintahan dikuasai kembali oleh Belanda. Bulan September 1945 Australia yang membawa NICA meninggalkan Samarinda sesudah Jepang dikembalikan semua ke negerinya. Maka pemerintahan Belanda mulai dibentuk kembali. Terhitung sejak tanggal 1 Januari 1946 dengan Besluit Letnan Gubernur Jenderal, Kalimantan Timur di bentuk menjadi Keresidenan (*residentie*) dengan Samarinda sebagai Ibukotanya.

B. Perubahan Sistem Pemerintahan

Pernyataan van Mook untuk tidak berunding dengan Soekarno adalah salah satu faktor yang memicu perubahan sistem pemerintahan dari presidensiil menjadi parlementer. Gelagat ini sudah terbaca oleh pihak Republik Indonesia, karena itu sehari sebelum kedatangan Sekutu, tanggal 14 November 1945, Soekarno sebagai kepala pemerintahan republik diganti oleh Sutan Sjahrir yang seorang sosialis dianggap sebagai figur yang tepat untuk dijadikan ujung tombak diplomatik, bertepatan dengan naik daunnya partai sosialis di Belanda.

Terjadinya perubahan besar dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia (dari sistem Presidensiil menjadi sistem Parlementer) memungkinkan perundingan antara pihak Republik Indonesia dan Belanda. Dalam pandangan Inggris dan Belanda, Sutan Sjahrir dinilai sebagai seorang moderat, seorang intelek, dan seorang yang telah berperang selama pemerintahan Jepang

Pihak Republik Indonesia memiliki alasan politis untuk mengubah sistem pemerintahan dari Presidensiil menjadi Parlementer, karena seminggu sebelum perubahan pemerintahan itu, Den Haag mengumumkan dasar rencananya. Ir Soekarno menolak hal ini, sebaliknya Sjahrir mengumumkan pada tanggal 4 Desember 1945 bahwa pemerintahnya menerima tawaran ini dengan syarat pengakuan Belanda atas Republik Indonesia.

Tanggal 10 Februari 1946, pemerintah Belanda membuat pernyataan terperinci tentang politiknya dan menawarkan mendiskusikannya dengan wakil-wakil Republik yang diberi kuasa. Tujuannya hendak mendirikan persemakmuran Indonesia, yang terdiri dari daerah-daerah dengan bermacam-macam tingkat pemerintahan sendiri, dan untuk menciptakan warga negara Indonesia bagi semua orang yang dilahirkan di sana. Masalah dalam negeri akan dihadapi dengan suatu parlemen yang dipilih secara demokratis dan orang-orang Indonesia akan merupakan mayoritas. Kementerian akan disesuaikan dengan parlemen tetapi akan dikepalai oleh wakil kerajaan. Daerah-daerah yang bermacam-macam di Indonesia yang dihubungkan bersama-sama dalam suatu susunan federasi dan persemakmuran akan menjadi rekan (*partner*) dalam Kerajaan Belanda, serta akan mendukung permohonan keanggotaan Indonesia dalam organisasi PBB.

Pada bulan April dan Mei 1946, Sjahrir mengepalai delegasi kecil Indonesia yang pergi berunding dengan pemerintah Belanda di Hoge Veluwe. Lagi, ia menjelaskan bahwa titik tolak perundingan haruslah berupa pengakuan atas Republik sebagai negara berdaulat. Atas dasar itu Indonesia baru mau berhubungan erat dengan Kerajaan Belanda dan akan bekerja sama dalam segala bidang. Karena itu Pemerintah Belanda menawarkan suatu kompromi yaitu: "*mau mengakui Republik sebagai salah satu unit negara federasi yang akan dibentuk sesuai dengan Deklarasi 10 Februari*".

Sebagai tambahan ditawarkan untuk mengakui pemerintahan *de facto* Republik atas bagian Jawa dan Madura yang belum berada di bawah perlindungan pasukan Sekutu. Karena Sjahrir tidak

dapat menerima syarat-syarat ini, konferensi itu bubar dan ia bersama teman-temannya kembali pulang.

Tanggal 17 Juni 1946, Sjahrir mengirimkan *surat rahasia* kepada van Mook, menganjurkan bahwa mungkin perundingan yang sungguh-sungguh dapat dimulai kembali. Dalam surat Sjahrir yang khusus ini, ada penerimaan yang samar-samar tentang gagasan van Mook mengenai masa peralihan sebelum kemerdekaan penuh diberikan kepada Indonesia; ada pula nada yang lebih samar-samar lagi tentang kemungkinan Indonesia menyetujui federasi Indonesia - bekas Hindia Belanda dibagi menjadi berbagai negara merdeka dengan kemungkinan hanya Republik sebagai bagian paling penting. Sebagai kemungkinan dasar untuk kompromi, hal ini dibahas beberapa kali sebelumnya, dan semua tokoh politik utama Republik mengetahui hal ini.

Tanggal 17 Juni 1946, sesudah Sjahrir mengirimkan surat rahasianya kepada van Mook, surat itu dibocorkan kepada pers oleh surat kabar di Negeri Belanda. Pada tanggal 24 Juni 1946, van Mook mengirim kawat ke Den Haag: "*menurut sumber-sumber yang dapat dipercaya, usul balasan (yakni surat Sjahrir) tidak disetujui oleh Soekarno dan ketika dia bertemu dengannya, dia marah. Tidak jelas, apa arah yang akan diambil oleh amarah itu*". Pada waktu yang sama, surat kabar Indonesia menuntut dijelaskan desas-desus tentang Sjahrir bersedia menerima pengakuan *de facto* Republik Indonesia terbatas pada Jawa dan Sumatera.

1946: Konferensi Malino - Terbentuknya "negara" baru

Bulan Juni 1946 suatu krisis terjadi dalam pemerintahan Republik Indonesia, keadaan ini dimanfaatkan oleh pihak Belanda yang telah menguasai sebelah Timur Nusantara. Dalam bulan Juni diadakan konferensi wakil-wakil daerah di Malino, Sulawesi, di bawah Dr. Van Mook dan minta organisasi-organisasi di seluruh Indonesia masuk federasi dengan 4 bagian: Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Timur Raya.

Bulan Agustus pemerintah Belanda melakukan usaha lain untuk memecah halangan dengan menunjuk tiga orang Komisi

Jenderal datang ke Jawa dan membantu Van Mook dalam perundingan baru dengan wakil-wakil republik itu. Konferensi antara dua belah pihak diadakan di bulan Oktober dan November di bawah pimpinan yang netral seorang komisi khusus Inggris, Lord Killeen. Bertempat di bukit Linggarjati dekat Cirebon. Setelah mengalami tekanan berat -terutama Inggris- dari luar negeri, dicapailah suatu persetujuan tanggal 15 November 1946 yang pokok pokoknya sebagai berikut :

1. Belanda mengakui secara *de facto* Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatra, Jawa dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah *de facto* paling lambat 1 Januari 1949,
2. Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk Negara Indonesia Serikat, dengan nama Republik Indonesia Serikat, yang salah satu bagiannya adalah Republik Indonesia
3. Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia - Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya.

Untuk ini Kalimantan dan Timur Raya akan menjadi komponennya. Sebuah Majelis Konstituante didirikan, yang terdiri dari wakil-wakil yang dipilih secara demokratis dan bagian-bagian komponen lain. Indonesia Serikat pada gilirannya menjadi bagian Uni Indonesia-Belanda bersama dengan Belanda, Suriname dan Curasao. Hal ini akan memajukan kepentingan bersama dalam hubungan luar negeri, pertahanan, keuangan dan masalah ekonomi serta kebudayaan. Indonesia Serikat akan mengajukan diri sebagai anggota PBB. Akhirnya setiap perselisihan yang timbul dari persetujuan ini akan diselesaikan lewat arbitrase.

Kedua delegasi pulang ke Jakarta, dan Soekarno-Hatta kembali ke pedalaman dua hari kemudian, pada tanggal 15 November 1946, di rumah Sjahrir di Jakarta, berlangsung penandatanganan secara resmi Perundingan Linggarjati. Sebenarnya Soekarno yang tampil sebagai kekuasaan yang memungkinkan tercapainya persetujuan,

namun Sjahrir yang diidentifikasi dengan rancangan dan yang bertanggung jawab bila ada yang tidak beres.

Wilayah Berau juga tidak lepas dari penguasaan Belanda kembali. Pembersihan tentara Jepang di wilayah Berau dibantu oleh tentara Australia yang didatangkan dari Samarinda. Swapraja-wapraja Kutai, Bulungan, Sambaliung, dan Gunung Tabur ditambah Pasir oleh Belanda diberi status sebagai *Neo Swapraja* yang kemudian disebut sebagai Gabungan Kesultanan Kalimantan Timur (GKKT) atau yang lebih dikenal dengan sebutan Federasi Kalimantan Timur.

Kondisi itu kemudian ditambah dengan adanya dukungan yang datang dari para aristokrat, terutama mereka yang telah diangkat sebagai pengganti para kepala dan penguasa yang pro Republik Indonesia. Sehingga kedudukannya sangat tergantung kepada keberadaan dan dukungan Belanda. Mereka itu biasanya adalah para bekas *Binnenland Bestuur* (Pamong Praja) yang dulunya bekerja untuk Belanda pada masa Kolonial. Oleh karena itu wajar apabila kemudian bekerja kembali untuk tuannya itu.

Para Elite keraton di Berau baik yang ada di Keraton Sambaliung maupun yang ada di Keraton Gunung Tabur pada saat Nica menduduki Wilayah Berau tidak mengalami gejolak yang berarti. Semasa sebelum kedatangan Jepang atau masa pendudukan kolonial keluarga keraton mendapat perhatian lebih, begitu seterusnya sampai masa pendudukan Jepang, hal yang sama juga terjadi ketika Belanda kembali menduduki Berau pada masa NICA.

Bulan Januari 1946 pemerintah Belanda membentuk *Oost Borneo* sebagai Residentie dengan ibukota di Samarinda. Afdeling Bulungan dan Berau beribukota di Tarakan di duduki oleh Assisten Resident Van Duersen. Sebelum perang dunia ke II Afdeeling Kutai dan Pasir adalah Samarinda dan berkedudukan *Assistant Resident*. Afdeeling Bulungan dan Berau adalah Tanjung Selor dan berkedudukan *Assistant Resident*. Kemudian *assistant Resident* ini dialihkan oleh pemerintah Belanda ke Tarakan, maka khusus mengenai *Residentie Van Oost Borneo* yang terdiri dari empat

Zelfbestuur plus Neo Zelfbestuur dibentuk dan dijadikan satu federatie yang kemudian disebut federasi Kalimantan Timur yang diketuai oleh A.R. Kariowiti.

Gabungan antara Kesultanan Kutai, Kesultanan Bulungan, Kesultanan Gunung Tabur, Kesultanan Sambaliung dan Neo Zelfbestuur Pasir merupakan badan Eksekutif yang ada dalam Federasi Kalimantan Timur yang diketuai oleh A.M. Parikesit. Dalam federasi Kalimantan Timur juga ada badan yang dinamakan *Bestuurs College* yang merupakan pemerintah harian yang di ketuai oleh A.P. Aflous.

Bersama-sama dengan polisi lokal yang dipekerjakan di bawah kekuasaan dan tanggung jawab Pemerintah Indonesia Timur melalui SK Letnan Gubernur Jenderal 14 Maret 1946 No 3 dan SK Komisariat Pemerintahan Umum untuk Borneo dan Timur Besar tanggal 14 Maret 1946 No ARC 1/9/43 dan No ARC 1/9/7. Kondisi itu berarti semua residen, asisten residen, kontrolir, dan pamong praja Indonesia seperti bestuur assistant, menteri polisi dan pegawai administrasi lainnya, demikian juga dengan pegawai kepolisian dari Hoofkomisaris sampai pangkat terendah yang dulunya dipekerjakan di wilayah Indonesia Timur mulai saat itu ada di bawah kekuasaan dan tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri Negara Indonesia Timur.

Berdasarkan undang-undang No 22 Tahun 1948 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, maka 3 (tiga) daerah di Kalimantan Timur di bentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara (DPRD-S).bertepatan dengan pembentukan DPRD di Kalimantan Timur ini pergolakan penolakan Swapraja di daerah Jawa sedang terjadi. Penolakan tidak terjadi di Pulau Jawa saja akan tetapi juga di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di wilayah Berau. Sebagai partai politik penggerak yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI) dan INI beserta ormas-ormasnya mengadakan aksi anti swapraja dan menuntut untuk segera dihapuskannya semua sistem Swapraja di seluruh Indonesia.

Pada bulan Maret 1950, dewan gabungan Kesultanan atau dewan federasi Kalimantan Timur mengeluarkan keputusan yang

menghendaki Kalimantan Timur bergabung dengan Republik Indonesia. Kehendak ini merupakan kehendak yang suci tanpa ada paksaan dari manapun juga. Karena kemerdekaan yang utuh sebenarnya sudah lama diidamkan oleh semua kesultanan yang ada di Kalimantan Timur termasuk kesultanan yang ada di Berau, Kesultanan Gunung Tabur dan Kesultanan Sambaliung.

Reaksi elite lokal Berau tentu menerima ini sebagai sebuah keputusan yang menggembirakan. Republik Indonesia Serikat melalui keputusan no 127 tahun 1950 menyatakan menyetujui maksud penggabungan Kalimantan Timur menjadi bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wakil pemerintah federasi Kalimantan Timur untuk Republik Indonesia Serikat A.P. Afloos menyerahkan secara resmi melalui sebuah upacara. Serah terima dilakukan oleh Residen RIS yaitu A. P. Afloos dan diterima oleh Dr. Moerjani sebagai wakil dan atas nama pemerintah Republik Indonesia. Semua dewan-dewan dibubarkan termasuk dewan di Berau. Berdasarkan undang-undang no 3 tahun 1953, Swapraja-swapraja di Kalimantan Timur menjadi daerah istimewa.

C. Melebur ke Negara Kesatuan Republik Indonesia/NKRI

Konsultasi Politik Nasional pada awal tahun 1950 merupakan periode krusial bagi Indonesia. Pertentangan dan konflik untuk menentukan bentuk negara bagi Bangsa dan Negara Indonesia tengah berlangsung. Pada satu sisi, secara resmi saat itu Indonesia merupakan negara federal, sebagaimana hasil perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB). Akan tetapi, pada saat yang bersamaan muncul gerakan yang menentang keberadaan negara federal itu. Gerakan ini eksis bukan saja di kalangan elite, tetapi juga di kalangan masyarakat bawah. Gerakan tersebut menghendaki diubahnya bentuk negara federal menjadi negara kesatuan.

Oleh banyak pengamat luar negeri gerakan itu dianggap terlalu dini, tergesa-gesa, tidak perlu dan agak angkuh. Pandangan seperti itu muncul, karena gerakan kaum republiken itu dianggap tidak memperhatikan semangat dan fasilitas yang ada dalam

persetujuan KMB. Akan tetapi apabila diperhatikan jauh, gerakan tersebut bukan saja kuat, tetapi juga sehat. Secara sosial dan politik, Indonesia akan berada dalam keadaan yang tidak baik jika tidak ada perkembangan tersebut.

Bagi kebanyakan orang Indonesia, sistem federal dianggap sebagai warisan kolonial sehingga harus segera diganti. Sistem itu dipandang sebagai alat pengawasan dan peninggalan Belanda. Oleh karena itu, sistem federal merupakan halangan bagi tercapainya kemerdekaan Indonesia yang lepas sama sekali dari Belanda. Dengan dasar pikiran itu, maka mempertahankan sistem federal berarti mempertahankan warisan penjajahan masa lampau yang tidak disukai masyarakat (Kahin 1995:157).

Meskipun demikian perjuangan kaum republiken untuk mewujudkan terbentuknya sebuah negara kesatuan bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Pada satu sisi, saat itu secara resmi masih tegak berdiri sebuah negara yang secara resmi berbentuk negara federal lengkap dengan alat-alat kenegaraannya. Dengan demikian, betapapun lemahnya pendukung sistem negara federal tersebut pasti masih ada di Indonesia. Oleh karena itu, perjuangan untuk mengembalikan bentuk negara dari federal menjadi kesatuan harus dilakukan dengan cara yang benar agar tidak dianggap sebagai pemberontakan kepada pemerintah yang sah.

Pada sisi yang lainnya, saat itu tentara Belanda masih ada di Indonesia, lengkap dengan persenjataannya. Mereka ini merupakan pendukung kaum federalis. Dengan demikian, kaum republiken harus juga bersiap menghadapi konflik dengan tentara Belanda sebagai sebuah kesatuan resmi atau paling tidak pada oknum tentara Belanda.

D. Kondisi Sosial - Politik di Indonesia Setelah KMB

Adanya halangan psikologis, ternyata masih ditambah realitas politik yang berkembang saat itu. Dalam negara Republik Indonesia Serikat (RIS), Republik Indonesia (RI) yang sesungguhnya tidak lebih dari satu diantara 32 negara bagian yang ada, pada dasarnya

masih tetap otonom. Kondisi itu terlihat karena secara administrasi RI tidak bergantung kepada RIS. Hal itu lebih diperparah lagi dengan banyaknya pegawai negeri sipil dalam negara-negara bagian, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur dan Pasundan yang lebih mentaati aturan-aturan dari Ibukota RI Yogyakarta dibandingkan terhadap Jakarta. Keadaan itu seringkali menimbulkan administrasi ganda yang membingungkan. Ada dua kelompok pegawai negeri sipil yang berusaha mengatur teritorial yang sama dengan dua aturan yang sangat mungkin berbeda.

Fenomena itu merupakan manifestasi politik pada masa sebelumnya. Pembentukan negara-negara bagian di berbagai wilayah Indonesia oleh Belanda, pada dasarnya eksistensinya tidak pernah diakui oleh Pemerintah RI di Yogyakarta. Tindakan yang kemudian diambil oleh Pemerintah RI adalah mendirikan pemerintahan bayangan di negara-negara bagian, mulai dari desa sampai ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Untuk menunjukkan eksistensi RI di daerah yang kemudian dikenal sebagai *Bijeenkomst voor Federaal Overleg* (BFO) ini, dikirim Oeang Republik Indonesia (ORI).

Dengan tindakan itu, maka secara ekonomis dan politis Republik Indonesia masih eksis di wilayah BFO (Swasono, 1980: 184-187). Faktor lainnya adalah prestise Republik Indonesia yang tinggi karena dianggap sebagai pemenang perang dan perjuang kemerdekaan. Prestise itu semakin meningkat dengan terjaminnya *law and order* di wilayah RI, kelancaran administrasi pemerintahan dan korupsi yang relatif tidak ada dibandingkan dengan negara-negara bagian lainnya (Moedjanto, 1995: 569).

Semua kondisi itu diperkuat dengan solidnya kaum republikan di tubuh pemerintahan RIS. Mulai dari Presiden RIS, Ir. Soekarno jelas merupakan seorang republikan yang pasti mendukung gerakan kembalinya negara kesatuan. Perdana Menteri M. Hatta dan kabinetnya juga didominasi oleh kaum republikan. Oleh karena itu, secara politis dan administratif kaum republikan sudah menguasai pemerintahan Negara RIS. Saat itu, dalam susunan kabinet Hatta yang dianggap mewakili kaum federalis hanya lima orang, yaitu; Anak Agung Gde Agung sebagai menteri dalam

negeri, Kosasih sebagai menteri sosial, Arnold Mononutu sebagai menteri penerangan, Sultan Hamid II dan Suparmo sebagai menteri tanpa portopolio. Akan tetapi apabila diperhatikan lagi, meskipun Arnold Mononutu berasal dari BFO, sesungguhnya dalam parlemen Negara Indonesia Timur (NIT), dia merupakan kelompok pro-republiken. Dengan demikian, dia dipandang lebih republiken daripada federalis (Kahin' 1995: 569). Dari semua anggota kabinet Hatta, yang sungguh-sungguh mendukung bentuk negara federal hanyalah Sultan Hamid II dan Anak Agung Gde Agung (Faith, 1962: 47)

Pada sisi yang lainnya terdapat ambisi politik yang kuat dan terus dipelihara dalam tubuh Pemerintahan dan Negara RI untuk mengembalikan bentuk negara kesatuan di Indonesia. Hal itu dapat diketahui dengan ditematkannya usaha untuk meneruskan perjuangan mencapai negara kesatuan yang meliputi seluruh Kepulauan Indonesia dalam program kabinet Dr. A. Halim, Perdana Menteri RI (*Kedaulatan Rakyat*, 21 Januari 1950). Dorongan semangat yang lebih besar datang muncul karena dua kejadian. Pertama, ditariknya kekuatan militer Belanda di negara bagian yang tergabung dalam BFO. Kedua, berkaitan dengan yang pertama, kondisi tersebut menyebabkan dibebaskannya ribuan tahanan politik yang sangat pro-republiken dari berbagai penjara. Semua kondisi itu menyebabkan kekuatan gerakan persatuan menjadi lebih besar. Gerakan yang menentanginya hanya muncul di tempat-tempat di mana sejumlah kesatuan pasukan kolonial dan *Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger* (KNIL) belum didemobilisasi (Kahin, 1995, :572)

Kuatnya gerakan persatuan itu kemudian semakin bertambah kuat karena mayoritas masyarakat negara bagian juga tidak mendukung pembentukan negara-negara bagian tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pembentukan negara-negara bagian sangat tidak memiliki dukungan yang kuat, kecuali dari Belanda. Oleh karena itu, ketika Belanda mulai melepaskan kontrolnya atas negara-negara bagian maka rakyat negara bagian itu bergerak menuntut untuk kembali kepada RI. Dengan kondisi

itu, maka kejatuhan negara-negara bagian tinggal menunggu waktu saja. Oleh karena itu wajar apabila di berbagai negara bagian muncul gerakan yang menuntut pembubaran pemerintah daerahnya atau negara bagiannya. Gerakan semacam itu kemudian menuntut agar daerahnya digabungkan kepada Republik Indonesia.

E. Gerakan Pembubaran Negara Federal di Daerah

Negara bagian yang memelopori pembubaran pemerintahannya adalah Pasundan. Tindakan itu dilakukan bahkan sebelum Pemerintahan RIS resmi terbentuk dan berkuasa di Indonesia. Jadi di Pasundan gerakan menentang bentuk federal sudah dilakukan bahkan ketika negara Indonesia belum resmi berbentuk federal. Kemunculan gerakan anti negara federal dimulai dengan adanya resolusi dari berbagai elemen masyarakat untuk menggabungkan wilayahnya dengan Republik Indonesia.

Keadaan itu sebagian besar disebabkan kurang kemampuan Pemerintah Pasundan untuk memelihara keamanan dan ketertiban di wilayahnya. Situasi itu mendorong adanya resolusi dari Indramayu yang diantaranya ditujukan kepada Presiden RI dan ketua Komite Nasional Indonesia Pusat. Isi resolusi itu mendesak Pemerintah RIS supaya sebelum pengakuan kedaulatan selektif mungkin mengubah status Jawa Barat menjadi daerah RI dengan cara menghapus Negara Bagian Pasundan. Tindakan itu dilakukan supaya keadaan di Jawa Barat aman tentram. Resolusi itu muncul berdasarkan kejadian di desa-desa yang keamanannya tidak terjamin. Hal itu membuktikan bahwa Negara Bagian Pasundan tidak dapat menjamin keamanan dan ketentraman rakyatnya (*Kedaulatan Rakyat*, 17 Desember 1950).

Kondisi itu kemudian meluas dengan keputusan kepala desa di Tasik Malaya yang memutuskan hubungan dengan Pemerintahan Pasundan dan memilih bergabung dengan RI. Lebih jauh lagi tindakan itu kemudian didukung oleh sebelas anggota Dewan Perwakilan Kabupaten Tasikmalaya. (*Kedaulatan Rakyat*, 20 Desember 1949). Dengan demikian peristiwa "pembelotan"

para kepala desa itu mendapatkan dukungan politis di tingkat pusat, sehingga mendapatkan legitimasi yang kuat secara politik. Dukungan rakyat Jawa Barat terhadap gerakan penyatuan semakin besar ketika terjadi peristiwa Westerling di Bandung pada awal 1950.

Semua kondisi itu telah merusak kedudukan dan reputasi kaum federalis. Apalagi sejak peristiwa Westerling timbul keyakinan di kalangan masyarakat bahwa beberapa pejabat tertentu Pemerintah Pasundan telah mengadakan semacam perjanjian dengan Westerling. Tuduhan itu menguat karena adanya kenyataan bahwa sejumlah anggota Pemerintahan Pasundan ternyata berkebangsaan Belanda. Mereka itu kebanyakan bertugas di bidang militer. Saat itu, sebagian perwira polisi dan Militer dalam tubuh Pasundan masih dijabat orang-orang Belanda. Mereka itulah yang kemudian membelot kepada Westerling. (Kahin, 1995: 578).

Keadaan itu semakin memperkuat posisi kaum republiken di Parlemen Pasundan. Dimotori oleh Oli Setiadi dan Dr. Hasan Nata Begara Cs, mereka ini kemudian mendesak parlemen agar Negara Pasundan dibubarkan saja. (Sewaka, 1955: 171). Dengan kondisi politik yang seperti itu, akhirnya melalui Keputusan Parlemen Pasundan 8 Maret 1950 dengan suara bulat diputuskan untuk menggabungkan Negara Pasundan ke dalam Negara RI. (Suherly, 1970). Keputusan itu kemudian disahkan dengan lahirnya Surat Keputusan RIS No 113 tanggal 11 Maret 1950 yang menyatakan bahwa wilayah Pasundan termasuk ke dalam Negara RI. Pemerintah RIS di Jawa Barat kemudian diganti dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan gubernurnya yang dijabat oleh M. Sewaka, yang sebelumnya bertugas sebagai Komisaris RIS di Pasundan. (Sjamsudin, 1992: 82).

Meskipun demikian, negara bagian pertama yang secara resmi bergabung kembali dengan RI adalah Negara Bagian Sumatera Selatan. Pada tanggal 10 Februari 1950, Dewan Perwakilan Negara Bagian Sumatera Selatan mengadakan pemungutan suara untuk menyerahkan kekuasaan negara bagian itu kepada Pemerintah RIS. Peristiwa itu kemudian menjadi efek bola salju yang semakin

lama semakin besar, karena kejadian di Sumatera Selatan segera diikuti oleh hampir semua negara bagian. Namun demikian ada kecenderungan untuk lebih memilih membubarkan negara bagian yang bersangkutan dan kemudian digabungkan ke dalam Negara Bagian Republik Indonesia. Dengan demikian, negara-negara bagian itu tidak membubarkan diri dan menyerahkan kekuasaannya kepada RIS, tetapi melebur ke dalam Republik Indonesia. Gerakan itu tidak ditentang oleh para pemimpin RIS. Mereka justru memberikan kesempatan kepada gerakan tersebut untuk meneruskan tindakannya.

Kalimantan Timur pada tanggal 10 April 1950 bergabung berdasarkan keputusan presiden RIS no. 127/1950 tanggal 4 April 1950. Pada tahun 1953 dikeluarkan undang-undang darurat no.3/1953 yang mengatur tentang pembentukan daerah swatantra ke II se Kalimantan yang kemudian diganti dengan daerah istimewa, untuk Kalimantan Timur ada tiga daerah istimewa yaitu:

1. Daerah Istimewa Bulungan kepala daerahnya yaitu Sultan Maulana Muhamad Djalaluddin yang kemudian diganti dengan Andi Tjatjo gelar Datuk Wihardja
2. Daerah Istimewa Kutai kepala daerahnya adalah Sultan A.M. Parikesit
3. Daerah Istimewa Berau, Kepala daerahnya adalah Sultan Ayub (Sultan dari kerajaan Gunung Tabur) sedangkan wakilnya adalah Sultan Maulana (Sultan dari Sambaliung).

Khusus untuk daerah Istimewa Berau karena terdiri dari dua kerajaan yaitu Kerajaan Sambaliung dan Kerajaan Gunung Tabur maka kepala daerahnya bergantian. Bila kepala daerahnya dari Gunung Tabur maka wakilnya dari kerajaan Sambaliung begitu sebaliknya dan seterusnya.

Fenomena itu disebabkan gelombang pasang semangat nasionalis yang besar di kalangan anggota Senat RIS. Mereka itu percaya bahwa tujuan dan politik masa depan mereka harus disesuaikan dengan kondisi politik yang sedang berkembang

saat itu. Oleh karena itu, mereka mengikuti kemauan Majelis Permusyawaratan dan Pemerintah RIS untuk mengeluarkan suatu undang-undang darurat berdasarkan Pasal 130 Konstitusi RIS yang berisi pembubaran negara-negara bagian dan digabungkan ke dalam R I. Undang-undang itu dikeluarkan pada tanggal 7 Maret 1950.

Selanjutnya, dua hari kemudian, diadakan pemungutan suara bagi persetujuan penggabungan Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Madura ke dalam RI. Setelah itu, berbagai daerah dan negara bagian mengajukan permohonan untuk menggabungkan diri ke dalam RI. Sehingga pada akhir Maret 1950 tinggal empat negara bagian yang masih berdiri, yaitu Kalimantan Barat, Negara Sumatera Timur (NST), Negara Indonesia Timur (NIT) dan R I yang wilayahnya menjadi lebih luas. (Kahin, 1995: 579)

Ada dua alasan mengapa Republik Indonesia serikat mengalami kegagalan yaitu

1. Indonesia merasa dikhianati oleh Gubernur Jenderal Belanda Van Mook, karena pendirian negara miniatur di luar federasi: Pasundan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Bangka, Belitung, di luar kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Belanda, dan
2. Tokoh pemimpin dari wilayah Timur Indonesia, berisikan mengenai tiga setengah tahun pelaksanaan federalisme di wilayah Timur Indonesia ternyata gagal memberikan hasil memuaskan. Konsep politik lokal ciptaan Belanda tersebut menemui jalan buntu ketika penguasa lokal harus berhadapan dengan elite nasionalis revolusioner yang berjuang dalam kombinasi diplomasi dan gerilya sekaligus. Para elite nasionalis revolusioner tersebut sangat mencurigai itikad buruk pemerintah kerajaan.

Setelah Kalimantan Barat digabungkan ke dalam Republik Indonesia melalui sidang Majelis Permusyawaratan pada tanggal 22 April 1950, (Kahin, 1995: 579) maka tinggal 3(tiga) negara

bagian dalam Republik Indonesia Serikat, yaitu; RI, NST, dan Negara Indonesia Timur. Masih kokohnya dua negara bagi terakhir itu disebabkan beberapa faktor. Berhubungan dengan kokohnya Negara Indonesia Timur sebagai negara bagian dalam RIS, terdapat banyak hal bersifat kompleks yang telah membentuk aliansi anti republik. Aliansi itu terdiri dari kaum bangsawan Melayu, bagian terbesar raja-raja Simalungun, beberapa Kepala Suku Karo, dan kebanyakan tokoh masyarakat Cina. (Langenber 1990: 140).

Mereka itu semua merasa kedudukannya terancam dengan berdirinya negara baru. Perasaan itu muncul karena selama tahun-tahun awal kemerdekaan terdapat pengalaman pahit berkaitan dengan tekanan kaum republik terutama kaum pemudanya yang sangat anti bangsawan. Oleh karena itu, bagi kaum bangsawan Sumatera Timur mereka mendambakan kembalinya Pemerintah Kolonial Belanda yang mampu menjamin kedudukan dan keselamatan mereka. Dalam pandangan kaum bangsawan Melayu Republik Indonesia akan mengancam kelanjutan perlindungan dan keistimewaan yang mereka nikmati di bawah payung pemerintah kolonial. Kondisi itu kemudian ditambah munculnya kesadaran oleh para petani Melayu pada akhir 1945 bahwa ada keinginan di kalangan mayoritas penduduk non-Melayu untuk menghapus hak-hak istimewa kaum Melayu atas tanahnya. (Langenberg, 1990: 139). Sehingga mereka menyambut baik campur tangan Belanda di Sumatera Timur. Harapannya adalah dengan kembalinya Belanda maka akan pulih kembali hak-hak adat penduduk Melayu maupun penduduk asli lainnya. Selain itu, tentu saja akan terjaga segala kepentingannya.

Bersamaan dengan itu beberapa anggota pribumi Pemerintah Kolonial yang kolot, terutama beberapa tokoh Batak karena tak puas terhadap penguasaan Pemerintah Republik oleh kaum "ekstrim" bergeser lebih jauh ke dalam kubu kaum anti-republik. Perasaan phobia terhadap kehadiran R I juga merasuki kaum Cina di Sumatera Timur. Mereka itu telah menderita di bawah tekanan kaum "ekstrimis" republik. Bentuk fisik yang berbeda dengan

penduduk asli, ditambah dengan kedudukan ekonomi yang lebih baik sehingga sering menimbulkan kecemburuan sosial. Semua itu menjadikan orang-orang Cina sebagai sasaran kekejaman para pemuda "pejuang". Selama bulan-bulan awal revolusi sekelompok pemuda secara teratur merampoki toko-toko dan gudang-gudang milik orang Cina. (Langenberg, 1982: 11)

Sebagai jawabannya kemudian masyarakat Cina di Medan mendirikan kesatuan Poh An Tui, yaitu pasukan keamanan Cina yang dipersenjatai Inggris. Mereka ini meronda daerah pecinan di Medan, Binjai, dan Pematang Siantar. Kesatuan tersebut bersama dengan pasukan Belanda turut serta mempersiapkan berdirinya Negara Sumatera Timur yang disponsori Belanda dan bangsawan setempat. (Langenberg, 1990: 139). Secara riil, kelompok masyarakat yang tergabung dalam aliansi anti Republik Indonesia sesungguhnya hanya sepertiga saja dari jumlah seluruh pendukungnya. Akan tetapi dengan adanya perpecahan antar elit dan masyarakat membuat daerah itu mampu dimanfaatkan Belanda sebagai salah satu negara bagian dengan tokoh-tokoh dan pasukan militer yang kuat dan gigih menentang keberadaan Republik Indonesia di wilayahnya.

Kombinasi dari semua faktor itu akhirnya mendukung lahirnya aliansi anti republik di Sumatera Timur. Keadaan itu membuat Negara Sumatera Timur masih berdiri hingga saat terakhir eksistensi Republik Indonesia Serikat. Walaupun demikian, tidak berarti rakyat di Sumatera Timur tidak menghendaki pembubaran negara bagiannya dan memilih bergabung dengan Republik Indonesia. Selama revolusi fisik, di Sumatera Timur bahkan muncul berbagai macam kelompok bersenjata yang gigih berjuang melawan Belanda. Meskipun kontrol pemerintah pusat terhadap mereka sangat lemah, bahkan dapat dikatakan tidak ada sama sekali.

Negara Indonesia Timur mampu bertahan hingga akhir karena beberapa faktor. Pertama, Belanda sejak awal sudah memilih Indonesia Timur untuk dijadikan daerah utama yang akan bergabung dengan sebuah negara federal Indonesia Serikat. Di samping itu, ada satu hal yang penting yaitu; secara militer

Belanda aktif di kawasan itu. Belanda sejak lama menjadikan daerah Ambon dan Minahasa sebagai keanggotaan KNIL. Dengan kondisi itu, tidak heran bila Indonesia Timur menjadi daerah pertama yang dijadikan Belanda sebagai daerah bagian yang akan bergabung ke dalam apa yang disebut Negara Indonesia Serikat. Indonesia timur dapat seperti itu karena Belanda mempunyai persiapan matang untuk kembali berkuasa di wilayah tersebut.

Dukungan yang kuat juga datang dari militer Australia yang ditugasi Sekutu untuk mengamankan kawasan tersebut terhadap Belanda. Oleh karena itu, para pejabat NICA (*Netherlands Indies Civil Administration*) dengan leluasa dapat masuk ke wilayah Sulawesi dengan membonceng pasukan Sekutu, termasuk pasukan pelopor yang mendarat di Makassar 21 September 1945. Mereka itulah yang kemudian membebaskan semua tahanan Sekutu di Sulawesi Selatan dan menempatkan sekitar 3000 orang Belanda bekas tahanan Jepang kembali ke Makassar. Keadaan itu memang berbeda dengan tindakan pasukan Inggris di Jawa yang tidak leluasa karena khawatir membahayakan keselamatan tahanan dan tawanan perang yang banyak jumlahnya. Pasukan Australia di Sulawesi relatif bebas untuk berurusan dengan pasukan Jepang ataupun dengan bekas pejabat lokal.

Tujuan utama mereka adalah mendirikan pemerintahan yang dapat menjamin ketertiban umum dan mendapatkan beras dari daerah pedalaman bagi kebutuhan pangan penduduk Makassar. Untuk itu mereka segera mengangkat para pejabat Belanda sebelum PD II. Beberapa diantaranya adalah *interniran* yang baru saja dibebaskan dari kamp tahanan Jepang, sebagai pejabat sementara pemerintahan sipil. Kondisi itu segera dipergunakan Belanda untuk membanjiri daerah-daerah yang diduduki Pasukan Australia dengan pasukan Belanda dan bekas pegawai pamong praja (*Corps Binnenland Bestuur*), seperti residen, asisten residen, kontrolir atau jabatan lainnya. Dengan demikian sesungguhnya tentara Australia telah bekerja untuk kepentingan Belanda.

Dukungan terang-terangan pasukan sekutu (Australia) terhadap Belanda dapat diketahui dari maklumat Panglima Tentara

Australia di Makassar Brigadir Jendral Chilton pada tanggal 29 Oktober 1945 yang isinya sangat menekan gerakan pemuda pendukung proklamasi kemerdekaan. Salah satu isinya adalah melarang orang memakai seragam militer atau uniform lain, selain anggota pasukan Sekutu atau polisi. Selain itu, dalam maklumat itu juga melarang penduduk untuk mengikuti latihan militer, memakai atau mempunyai segala macam senjata api dan senjata tajam, mengadakan pawai atau pertunjukan, dan sebagainya. Lebih lanjut Jendral Chilton bahkan telah melarang Gubernur Sulawesi saat itu Dr. G.S.S.J. Ratulangi untuk menjalankan tugasnya, karena pemerintahan sipil telah dijalankan oleh NICA dengan tanggung jawab dan perlindungan tentara Australia yang bertindak sebagai kesatuan Sekutu. Apabila perintah itu dilanggar oleh Dr. G.S.S.J. Ratulangi maka terhadapnya akan diambil tindakan penahanan.

Posisi Belanda semakin kuat dengan diijinkannya Pemerintah Belanda menempatkan seorang berpangkat *Chief Commanding Officer NICA (Chief Co-NICA)* di Morotai mendampingi Panglima Tertinggi Tentara Australia. *Chief Co-NICA* ini mempunyai wewenang seluruh wilayah Indonesia Timur dan Kalimantan (kecuali Bali). Selain itu dia juga membawahi semua petugas NICA yang ada di Indonesia Timur. Dengan kesempatan yang diberikan oleh Pasukan Australia, Belanda dalam waktu singkat berhasil mengembalikan fungsi aparat pemerintahannya di wilayah Indonesia bagian timur.

Semuanya itu jelas mempunyai pengaruh atas perkembangan politik di wilayah yang bersangkutan. Oleh karena dengan persiapan matang itulah, maka secara politis wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara dan Maluku yang kemudian disebut sebagai Indonesia Timur menjadi salah satu daerah yang secara politis cukup kuat untuk menjadi semacam daerah yang berdiri sendiri terpisah dengan Pemerintah Republik Indonesia di Yogyakarta. Hal itulah yang menyebabkan Negara Indonesia Timur dapat bertahan lama menjadi daerah bagian dalam wilayah federal Republik Indonesia Serikat.

Semua kondisi itu kemudian ditambah dengan adanya dukungan yang datang dari para aristokrat, terutama mereka yang telah diangkat sebagai pengganti para kepala dan penguasa yang pro-RI. Sehingga kedudukannya sangat tergantung kepada keberadaan dan dukungan Belanda. Mereka itu biasanya adalah para bekas *Binnenland Bestuur* (pamong praja) yang dulunya bekerja untuk Belanda pada masa kolonial. Oleh karena itu wajar apabila kemudian bekerja kembali untuk tuannya itu.

Bersama-sama dengan polisi lokal yang dipekerjakan di bawah kekuasaan dan tanggung jawab Pemerintah Indonesia Timur melalui SK Letnan Gubernur Jendral 14 Maret 1946 No 3 dan SK Komisariat Pemerintahan Umum untuk Borneo dan Timur Besar tanggal 14 Maret 1946 No ARC 1/9/43 dan No ARC 1/9/7. Kondisi itu berarti semua residen, asisten residen, kontrolir, dan pamong praja Indonesia seperti bestuur assistant, menteri polisi dan pegawai administrasi lainnya, demikian juga dengan pegawai kepolisian dari *Hoofkomisaris* sampai pangkat terendah yang dulunya dipekerjakan di wilayah Indonesia Timur mulai saat itu ada di bawah kekuasaan dan tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri Negara Indonesia Timur.

Dengan semua latar belakang yang seperti itu wajar apabila Negara Indonesia Timur mampu bertahan hingga akhir dalam tubuh Rerpublik Indonesia Serikat. Meskipun demikian dalam wilayah Negara Indonesia Timur dapat pula diketemukan gerakan perlawanan terhadap Belanda yang sangat keras, bahkan tidak kalah kerasnya dibandingkan yang ada di Jawa. Akan tetapi, karena kuatnya militer Belanda di sana, maka gerakan kaum republiken dapat diatasi oleh Belanda dan para kolaboratirnya. Pada akhirnya ketika militer Belanda ditarik dari wilayah itu, maka kaum federalis mulai menyadari bahwa mereka tidak akan mampu bertahan dari arus republiken. Hal itu semakin jelas ketika ribuan tahanan politik yang semuanya kaum republiken dibebaskan, maka tuntutan terhadap pembiaran Negara Indonesia Timur dan penggabungan ke dalam Republik Indonesia semakin nyata dan kuat.

Sehubungan dengan semakin kuatnya gerakan pro-republik, maka tanggapan yang diberikan oleh elit Negara Indonesia Timur ada dua cara. Pertama, mereka berusaha mencegah gerakan tersebut. Akan tetapi ketika gerakan itu semakin kuat, maka mereka berusaha memisahkan diri dengan membentuk negara terpisah dari Indonesia. Gerakan ini dipimpin oleh Dr. Soumokil csyang berusaha mendirikan Republik Maluku Selatan (RMS).

Sedangkan yang lainnya berusaha untuk meleburkan diri ke dalam tuntutan masyarakat. Sebagaimana yang dilakukan oleh Presiden Negara Indonesia Timur Sukawati, Menteri Dalam Negeri Daeng Passewang dan lainnya yang ada dalam kabinet terakhir Negara Indonesia Timur. Sesungguhnya kabinet terakhir Negara Indonesia Timur berisi tokoh-tokoh yang siap meleburkan Negara Indonesia Timur ke dalam Republik Indonesia. (Nalenan,1981:203). Oleh karena itu proses perubahan Repblik Indonesia Serikat menjadi negara kesatuan dapat berjalan tanpa hambatan dalam tataran politis.



Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kaltantan Barat



**Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat**

BAB IV

DARI FEDERAL MELEBUR KE NKRI

A. Konstelasi Politik Nasional

Pada bulan Mei 1945 pasukan Sekutu berhasil menguasai semua wilayah Tarakan dan sekitarnya. Sebulan kemudian tentara Sekutu datang ke wilayah Berau untuk mencari, menampung dan mengungsikan orang-orang Belanda yang masih hidup untuk dikembalikan ke negeri Belanda. Kemenangan Sekutu atas Jepang membuat wilayah Indonesia dikuasai oleh Belanda kembali. Pada bulan Januari 1945, Pemerintah Belanda membentuk *Oost Borneo* sebagai residentie dengan ibukota di Samarinda. Berau bersama Bulongan menjadi wilayah afdeeling dengan ibukotanya di Tarakan.

Berita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamkan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 disambut dengan antusias yang tinggi oleh masyarakat Indonesia. Konskuensi dari proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah rakyat harus berjuang melawan penjajah yang ingin tetap berkuasa di wilayah Indonesia. Untuk mempertahankan kemerdekaan yang baru diproklamkan maka rakyat bersatu melakukan perlawanan terhadap penjajah. Gerakan rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan yang baru diproklamkan terjadi serentak di beberapa daerah. Gerakan untuk melawan penjajah tidak hanya di Pulau Jawa saja, di Pulau Kalimantan juga muncul gerakan-gerakan melawan penjajah.

Di wilayah Kalimantan Timur Belanda berusaha untuk melemahkan kekuasaan Republik Indonesia. Beberapa wilayah Swapraja, antara lain swapraja Kutai, Bulongan, Sambaliung dan Gunung Tabur serta Pasir digabungkan dalam organisasi yang bernama Gabungan Kesultanan Kalimantan Timur (GKKT) atau lebih populer dengan sebutan Federasi Kalimantan Timur. Aji

Muhammad Parikesit sultan Kutai di tunjuk sebagai ketuanya. Federasi ini diresmikan di Samarinda oleh Letnan Gubernur Jendral Dr.H.J.Van Mook pada bulan September 1957 (Pemda Kaltim.199;179). Federasi ini oleh Belanda diberi otonomi seluas-luasnya

Sebelum kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamirkan di Jakarta, daerah Kalimantan sudah mengalami pergolakan-pergolakan. Di wilayah Kalimantan Timur, pada bulan Januari 1945 pesawat B 29 *consolidated* milik Sekutu sudah mulai mejatuhkan bom untuk melumpuhkan pertahanan Jepang di wilayah Tarakan. Tarakan merupakan pusat dari tentara Jepang di wilayah Kalimantan Bagian Timur. Serangan Sekutu terhadap Jepang di wilayah Kalimantan Timur memaksa Jepang mulai meninggalkan Tarakan dan bergerak menuju Bulungan, Hal ini juga terjadi pada tentara Jepang dan pejabat teras serta masyarakat sipil yang ada di wilayah Berau. Bahkan pada tanggal 18 April 1945 pembesarpembesar Jepang yang datang dari Tarakan bersama pejabat-pejabat teras lainnya datang ke Tanjung Selor yang merupakan wilayah Berau.

Dengan semua perkembangan politik di Indonesia itu memaksa para elit yang ada di Negara Indonesia Timur (NIT) dan Negara Sumatera Timur (NST) untuk berunding dengan pemerintah Republik Indonesia Serikat. Oleh karena itu, dari tanggal 3 sampai 5 Mei 1950 diadakan perundingan antara Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat Muhammad Hatta, Presiden Negara Indonesia Timur Sukawati, dan Perdana Menteri Negara Sumatera Timur Dr. Mansyur. Hasilnya adalah disetujuinya pembentukan suatu negara kesatuan. Akan tetapi, pada tanggal 13 Mei 1950 Dewan Sumatera Timur menentang keputusan itu. Meskipun demikian, Dewan Sumatera Timur masih bersedia menerima pembubaran Republik Indonesia Serikat dengan syarat Negara Sumatera Timur dileburkan ke dalam Republik Indonesia Serikat bukan ke dalam Republik Indonesia.

Walaupun ada dukungan kuat dari sebagian besar penduduk Sumatera Timur, tetapi Perdana Menteri Hatta mendukung Dewan

Negara Sumatera Timur. Keputusan Hatta itu didasari situasi di Sumatera Timur yang masih rapuh untuk bergabung dengan Republik Indonesia. Muhammad Hatta berpikir bahwa apabila diambil jalan penggabungan Negara Sumatera Timur langsung ke dalam RI, mungkin dapat mendorong para bekas KNIL yang saat itu masih menjadi anggota batalyon keamanan Negara Sumatera Timur untuk memberontak sebagaimana tindakan yang diambil teman-temannya di Ambon.

Sehubungan dengan hasil konferensi antara Hatta, Mansyur dan Sukawati, maka sebagai tindak lanjut diadakan perundingan antara Perdana Menteri-Republik Indonesia Serikat, Muh Hatta yang mewakili Negara Indonesia Timur beserta dengan Negara Sumatera Timur di satu pihak dan Perdana Menteri -Republik Indonesia A. Halim pada pihak lainnya. Hasilnya adalah tercapainya persetujuan pada tanggal 19 Mei 1950 diantara kedua belah pihak untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persoalannya adalah bagaimana cara untuk membentuk sebuah negara kesatuan, sebagaimana yang dikehendaki seluruh rakyat Indonesia.

Pilihan yang diambil para pemimpin Indonesia adalah dengan cara mengubah Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Pilihan ini diambil karena apabila semua negara bagian melebur ke dalam Republik Indonesia Serikat (Republik Indonesia akan menjadi satu-satunya negara bagian dari Republik Indonesia Serikat, sehingga Republik Indonesia Serikat akhirnya terlikuidasi) akan menimbulkan berbagai macam kesulitan.

Adapun kesulitan yang timbul, antara lain, akan timbul masalah dengan para bekas anggota KNIL. Di samping itu ada alasan penting lainnya menyangkut hubungan dengan luar negeri. Jika seluruh negara bagian bergabung dengan Republik Indonesia, maka akan timbul kesulitan. Masalahnya adalah Republik Indonesia yang masih eksis adalah Republik Indonesia Serikat sebagai negara bagian Republik Indonesia Serikat (sebagai akibat persetujuan Konferensi Meja Bundar). Padahal yang menyelenggarakan hubungan luar negeri adalah Republik Indonesia Serikat yang telah

dilikuidasi. Dengan perkataan lain proses kembali dari Republik Indonesia Serikat ke Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui cara ini berarti peleburan negara yang telah mendapat pengakuan internasional dengan memunculkan sebuah negara baru. Oleh karena itu agar pengakuan dunia internasional tetap terpelihara secara yuridis, maka pembubaran Republik Indonesia Serikat harus dihindari.

Satu pilihan cerdas akhirnya diambil, yaitu dengan jalan mengubah konstitusi Republik Indonesia Serikat. Jadi secara yuridis Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah perubahan dari Republik Indonesia Serikat sebagai negara federal menjadi negara berbentuk kesatuan. Melalui cara itu terhindar permasalahan berkaitan dengan dunia internasional. Apabila Republik Indonesia Serikat dibubarkan dan digantikan oleh Republik Indonesia sebagai negara bagian dalam tubuh Republik Indonesia Serikat, maka negara baru yang muncul itu tidak dapat menjalankan hubungan internasional secara yuridis formal. Hal itu disebabkan Republik Indonesia Serikat sebagai negara bagian tidak dapat menyelenggarakan hubungan internasional. Akan lain persoalannya apabila Republik Indonesia berganti menjadi negara kesatuan. Secara yuridis tidak akan ada permasalahan dengan dunia internasional, karena yang berubah hanya konstitusinya saja, bukan negaranya.

Pada tanggal 27 Desember 1949 pemerintahan Kalimantan Timur secara resmi di serahkan ke wilayah Republik Indonesia Serikat. Wakil dari Republik Indonesia Serikat saat itu adalah Adji Raden Afloes. Sebelum adanya penyerahan wilayah ke RIS wilayah ini sudah lama bergejolak. Pergolakan politik di wilayah Kalimantan Timur sudah mulai ada sejak bulan Nopember 1949. Dewan Kalimantan Timur dalam sidangnya yang dilaksanakan pada tanggal 30 November 1949 mengeluarkan mosi yang isinya mendesak supaya didatangkannya misi militer TNI ke wilayah Kalimantan Timur, untuk menjaga keamanan di wilayah ini.

Tuntutan masyarakat Kalimantan Timur untuk bergabung kedalam Republik Indonesia mulai bermunculan di tahun 1950an.

Dalam rapat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1950 dewan gabungan kesultanan Kalimantan Timur mengeluarkan keputusan No.2 yang bunyinya "memutuskan beralaskan pada kemauan dan tuntutan-tuntutan rakyat Kalimantan Timur, mendesak pemerintah Republik Indonesia Serikat supaya segera mengambil keputusan menggabungkan daerah Kalimantan Timur pada Republik Indonesia". (Pemda Kaltim. 199:189).

Pemerintah Republik Indonesia yang bertempat di Yogyakarta segera merespon permintaan masyarakat Kalimantan Timur untuk bergabung menjadi bagian dari kesatuan Republik Indonesia dengan mengirrimkan surat No. 2279/50 pada tanggal 19 Maret 1950. Dalam suratnya pemerintah Republik Indonesia menyambut baik niat wilayah Kalimantan Timur untuk bergabung dalam republik Indonesia. Perjuangan Kalimantan Timur untuk keluar dari Republik Indonesia Serikat di dukung oleh Mohamad Natsir yang saat itu duduk dalam parlemen. Berdasarkan keputusan itulah maka dikeluarkan surat keputusan No.127 tahun 1950 pada tanggal 24 Maret yang isinya menghapuskan wilayah Kalimantan Timur dalam bagian Republik Indonesia Serikat dan menggabungkannya ke wilayah Republik Indonesia.

Penggabungan Kalimantan Timur ke Wilayah Republik Indonesia di realisasikan pada tanggal 10 April 1950 di Samarinda. Kalimantan Timur merupakan daerah pertama diluar Jawa dan Sumatera yang bergabung ke Republik Indonesia pada masa RIS.

Upacara resmi serah terima wilayah RIS ke RI dilaksanakan di Samarinda dengan di hadiri oleh A.R Afloes sebagai RIS untuk Kalimantan Timur dan menteri dalam negeri Republik Indonesia Mr. Soesanto Tirtoprojo dan pada tanggal itu juga, Dr. Moerjani yang bertindak sebagai wakil pemerintahan RI untuk wilayah Kalimantan membubarkan semua badan di Kalimantan Timur yang berasal dari bentukan Belanda pada masa zaman Federasi. Sebagai ganti federasi yang dibubarkan, maka Kalimantan Timur dibentuk menjadi daerah keresidenan dengan Roeslan Moelyoharjo sebagai Residen pertama.

Bergabungnya Kalimantan Timur ke dalam wilayah Republik Indonesia menjadikan wilayah ini terdiri dari 3 (tiga) daerah tingkat II. Hal ini ditetapkan dalam surat keputusan menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor C 17/15/3, pada tanggal 29 Juni 1950. Keputusan menteri dalam negeri diperkuat dengan surat keputusan Gubernur Kalimantan Nomor 186/OPB/92/14 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Agustus 1950 yang menjelaskan bahwa swapraja-swapraja di Kalimantan Timur diberi status sebagai daerah Istimewa setingkat Kabupaten. Sultan secara otomatis di angkat menjadi kepala daerah Istimewa. Daerah swapraja yang mendapat status sebagai daerah istimewa antara lain; Swapraja Kutai menjadi daerah istimewa Kutai, swapraja Berau yang meliputi kesultanan Sambaliung dan Gunung Tabur berganti nama menjadi daerah Istimewa Berau, dan yang terakhir adalah swapraja Bulungan.

Diantara ketiga Swapraja yang diubah menjadi daerah Istimewa, Berau memiliki keunikan dibanding daerah lain, karena daerah Istimewa Berau merupakan gabungan dua kesultanan yang ada pada saat itu yaitu kesultanan Sambaliung dan kesultanan Gunung Tabur.

Karena Daerah Istimewa Berau terdiri dari dua kesultanan yang digabungkan, maka dalam sistem pemerintahannya di jalankan secara bergantian antara sultan Gunung Tabur dan Sambaliung. Pergantian dilakukan dua tahun sekali, jika sultan Gunung Tabur menjabat sebagai Kepala daerah maka Sultan Sambaliung yang menjadi wakilnya dan ini dilakukan sebaliknya secara bergantian.

Pada tahun 1953 dikeluarkan Undang-Undang Darurat No.3/1953, yang mengatur tentang pembentukan daerah Swatantra ke II se Kalimantan. Daerah swapraja diganti menjadi Daerah Istimewa. Sultan Ayub (Sultan dari Gunung Tabur) ditunjuk menjadi kepala daerah sedangkan wakilnya di tunjuk Sultan Maulana (Sultan Sambaliung).

Perubahan pemerintahan menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia juga berdampak pada wilayah Kalimantan Timur dan Berau. Sebagai daerah yang pernah bergabung dalam wilayah

Republik Indonesia pada masa Republik Indonesia Serikat, maka wilayah Kalimantan Timur sudah memiliki 3 (tiga) wilayah yang sudah mandiri yaitu Berau, Bulungan dan Kutai. Bahkan berdasarkan UU no.39 tahun 1950 mereka berhak membentuk DPRD Sementara. Namun untuk wilayah Kutai DPRD Sementara belum sempat dibentuk.

Pada tahun 1956 DPRD Sementara dirubah menjadi DPRD Peralihan. Keputusan ini berdasarkan pada di keluarkanya Undang-undang Nomor 14 tahun 1956 tentang pembentukan Dewan Perwakilan rakyat daerah dan dewan pemerintah daerah Otonom. Pembagian jumlah anggota dewan telah diatur dalam peraturan menteri dalam negeri Nomor 12 Tahun 1956, untuk DPRD-Peralihan Kutai ditetapkan sebanyak 20 orang, Bulungan dan Berau memiliki jumlah anggota DPRD yang sama yaitu 15 orang saja. Untuk wilayah Daerah Istimewa Berau persebaran anggota DPRD Peralihanya dikuasai oleh 6 (enam) partai politik dengan Partai Nahdatul Ulama menjadi partai politik dengan jumlah anggota dewan paling banyak.

Berikut ini adalah komposisi anggota DPRDP; partai Nahdatul Ulama mendapat jatah 5 (lima) kursi, Masyumi duduk di urutan kedua dengan 4 (empat) kursi, Partai Nasional Indonesia (PNI) berhasil meraih 2 (dua) kursi, perolehan ini sama dengan Partai Murba. Partai Sosialis Indonesia dan Partai Komunis Indonesia masing-masing berhasil menempatkan satu orang wakilnya untuk duduk dalam kursi Dewan Perwakilan Rakyat Peralihan.

Selain DPRD Peralihan ada juga Dewan Pemerintah Daerah (DPD). Dewan Pemerintah Daerah untuk wilayah Kalimantan Timur secara otomatis di kepalai oleh keluarga kerajaan. Sultan secara otomatis menjadi kepala Daerah Istimewa (KDI). DPD terdiri dari 6 (enam) orang, termasuk dalam hal ini adalah ketua dan wakil ketua. Anggota DPD dipilih oleh DPRD dari kalangan anggotanya. Khusus untuk wilayah Daerah Istimewa Berau maka jumlah anggota DPD yang dipilih dari anggota DPRD hanya 4 (empat) orang saja. Hal ini di karenakan ketua dan wakil ketua DPD diambil dari sultan Sambaliung dan Sultan Gunung Tabur.

Jabatan ketua dan wakil ketua dijabat secara bergantian oleh kedua Sultan dengan tenggang waktu pergantian 2 (dua) tahun sekali. Pergantian kedudukan ini seperti yang terjadi dalam kedudukan sultan sebagai kepala dan wakil kepala daerah istimewa Berau. Keempat anggota lain dipilih dari perwakilan DPRD yang di tunjuk dari partai NU, Masyumi, PNI dan Partai Murba.

Sesudah dibubarkannya Republik Indonesia Serikat dan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia maka tuntutan Kalimantan Timur untuk menjadi wilayah propinsi sendiri makin santer dikumandangkan oleh rakyat. Residen Kalimantan Timur Ahmad Arif gelar datuk Madjo Oerang memprakarsai kongres rakyat Kalimantan Timur. Kongres ini dilaksanakan 2 (dua) kali yaitu pada tahun 1952 dan 1953. Dalam kongres kedua partai-partai politik dan organisasi kemasyarakatan bergabung baik dari Kutai, Bulungan maupun Berau. Hasil kongres merekomendasikan untuk segera mendirikan propinsi Kalimantan Timur.

Keinginan masyarakat Kalimantan Timur untuk menjadi propinsi akhirnya terlaksana pada tahun 1956. Hal ini merujuk dengan dikeluarkannya UU No.25 tahun 1956 yang berisi pembentukan daerah otonom provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Pada saat itu A.P.T. Pranoto menjadi residen di Kalimantan Timur. Keputusan ini diperkuat dengan keputusan menteri dalam negeri No. Des 52/10/50 pada tanggal 12 Desember yang menjelaskan bahwa UU No.25 tahun 1956 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1957.

Pada tanggal 9 Januari 1957 bertempat di kantor Gubernur Banjarmasin, di lakukan serah terima kepada tiga gubernur yang baru. Untuk wilayah Kalimantan Barat di wakili A.P. Afloes, Kalimantan Timur oleh A.P.T. Pranoto, sedangkan Kalimantan Tengah oleh Milono. Secara *de facto* dan *de jure* tanggal serah terima jabatan Gubernur Kalimantan Timur dijadikan sebagai hari lahirnya propinsi Kalimantan Timur. Setelah itu masyarakat Kalimantan Timur merayakan tanggal 9 Januari 1957 sebagai hari yang sangat berarti bagi mereka dan sebagai Gubernur Kalimantan Timur pertama adalah A.P.T. Pranoto.

Terpilihnya A.P.T. Pranoto sebagai kepala daerah Tingkat I merupakan titik awal dari perkembangan propinsi Kalimantan Timur. Pelantikan dan pengambilan sumpah A.P.T. Pranoto sebagai Gubernur Propinsi Kalimantan Timur dilaksanakan pada tanggal 5 Februari dan berlangsung di Samarinda. Gubernur pertama Kalimantan Timur dilantik oleh Rukadi Wirjahadja, yang datang mewakili menteri dalam negeri atas nama Presiden Republik Indonesia.

Pergantian di wilayah tingkat I berdampak pada daerah tingkat II. Kabupaten Berau yang semula adalah daerah Istimewa Berau juga melakukan perubahan dalam sistem pemerintahannya. Untuk menduduki jabatan Bupati Berau, maka dipilihlah Aji Raden Muhammad Ajub yang sebelumnya menjabat sebagai kepala Daerah Istimewa Berau. Pengangkatan Aji Raden Muhammad Ajub sebagai bupati pertama Kabupaten Berau ditetapkan setelah mendapat persetujuan dari pusat dengan dasar surat keputusan menteri dalam negeri dan Otonomi Daerah No.UO/7/8/12-960 yang di tandatangani pada tanggal 7 April 1960. Upacara pelantikan Aji Raden Muhammad Ajub sebagai Bupati dilaksanakan di Tanjung Redeb pada tanggal 9 Oktober 1960.

Perubahan sistem pemerintahan dari Daerah Istimewa menjadi kabupaten berdampak pada hilangnya status kesultanan. Secara *de jure* dan *de facto* wilayah Kalimantan Timur terhitung sejak tanggal 12 Oktober 1960 sudah bersih dari daerah kesultanan. Hal ini ditandai dengan dilantiknya Andi Tjahtjo sebagai bupati Bulungan yang merupakan daerah istimewa yang terakhir ditetapkan menjadi kabupaten. Jadi secara umum wilayah Propinsi Kalimantan Timur sudah tidak ada lagi kekuasaan kerajaan setelah 15 tahun kemerdekaan Republik Indonesia.

B. Proses Perubahan

Pada bulan Januari 1946 pemerintah Belanda membentuk *Oost Borneo* sebagai residentie dengan ibukota di Samarinda. Berdasarkan pada Undang-Undang no.22 tahun 1948 tentang

pokok-pokok pemerintahan daerah, maka wilayah Kalimantan Timur dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara berdasarkan Undang-Undang No.39 tahun 1950, bertepatan dengan itu, timbul pergolakan anti swapraja yang terjadi tanah Jawa dan diikuti oleh daerah-daerah lain di Indonesia. Gerakan ini juga merambah sampai wilayah Berau. Partai-partai politik, dalam hal ini PNI dan INI bersama ormas-ormasnya mengadakan aksi anti swapraja dengan tuntutan pembubaran swapraja-swapraja di seluruh Indonesia.

Gerakan pembubaran swapraja di wilayah Berau di pelopori oleh keluarga akrab dari sultan sultan sendiri (Pemda Tk II Berau,--: 32). Partai politik PNI yang secara nasional menolak swapraja bergerak cepat di wilayah ini. Partai politik yang ada di Berau menghendaki suatu Republik Indoinesia yang dipimpin oleh pribumi dan tidak dicampuri oleh kepentingan asing. Mereka tidak menghendaki sisa-sisa kolonialisme dan antek anteknya berkuasa di dalam tubuh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Puncak dari gerakan ini adalah pada bulan Maret 1950 dewan gabungan kesultanan atau dewan federasi Kalimantan Timur mengeluarkan keputusan menghendaki Kalimantan Timur bergabung dengan Republik Indonesia.

Permintaan Kalimantan Timur untuk bergabung dalam Republik Indonesia direspon dengan dikeluarkannya surat keputusan no. 127 tahun 1950 tentang bergabungnya Kalimantan Timur dalam Republik Indonesia. Proses serah terima Kalimantan Timur dari Republik Indonesia Serikat ke Republik Indonesia dilakukan melalui upacara yang ditandatangani oleh wakil Republik Indonesia Serikat dan wakil Republik Indonesia. Wakil pemerintah Republik Indonesia Serikat yaitu residen A.P. Afloes menyerahkan secara resmi wilayah Kalimantan Timur pada Republik Indonesia yang saat itu di wakili oleh DR. Moerjani.

Penyerahan Kalimantan Timur menjadi wilayah Republik Indonesia berdampak pada dibubarkanya dewan-dewan di wilayah Kalimantan Timur termasuk wilayah Berau. Berdasarkan UU No. 3 tahun 1953, swapraja di Kalimantan Timur berubah status

menjadi daerah Istimewa. Dampak dari di keluarkannya undang-undang No.3 tahun 1953, Swapraja Sambaliung dan Gunung Tabur digabungkan menjadi Daerah Istimewa Berau dengan ibukota di Tanjung Redeb.

Pada tanggal 9 Januari 1957 propinsi Kalimantan Timur terbentuk, dan terpisah dengan Kalimantan Selatan. Serah terima wilayah Kalimantan Timur ini dilakukan oleh gubernur Kalimantan Selatan Milono dengan Gubernur Kalimantan Timur, A.P. Tumenggung Pranoto. Pada tahun itu juga pemerintah pusat menerbitkan UU No. 27 tahun 1959. Dengan adanya undang-undang No. 27 tahun 1959 maka semua daerah istimewa yang berasal dari swapraja, kesultanan, kerajaan, *landschaap*, *Zelfbestuur* di seluruh Kalimantan Timur dihapus dan diganti menjadi Kabupaten (Daerah Tingkat II). Dampak dari peraturan ini adalah terjadi perubahan struktur dan nama dalam birokrasi, baik di level tingkat I (Propinsi) maupun Tingkat II (Kabupaten). DPRD juga mengalami banyak perubahan, mereka berganti nama menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II. Untuk menjadi bupati maka mekanismenya melalui pengajuan oleh anggota DPRD TK II. Hal ini memungkinkan masyarakat biasa bisa dipilih menjadi Bupati. Berau yang semula daerah Istimewa pun berubah menjadi kabupaten Berau.

Penetapan Kota Tanjung Redeb sebagai pusat pemerintahan Dati II Kabupaten Berau adalah untuk mengenang pemerintahan Kerajaan (Kesultanan) di Berau. Di mana pada tahun 1810 Sultan Alimuddin (Raja Alam) memindahkan pusat pemerintahannya ke Kampung Gayam yang sekarang dikenal dengan nama Kampung Bugis. Perpindahan ke Kampung Bugis pada tanggal 25 September tahun 1810 itu menjadi cikal bakal berdirinya kota Tanjung Redeb, yaitu kemudian dibadikan sebagai Hari jadi Kota Tanjung Redeb sebagaimana diterapkan dalam Perda No. 3 tanggal 2 April 1992

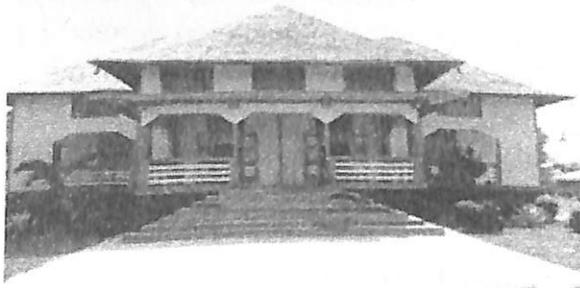
C. Sikap Elite Terhadap Perubahan

Seiring dengan bergabungnya Kalimantan Timur ke dalam wilayah Republik Indonesia yang kemudian ditetapkan dalam

surat keputusan menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor C 17/15/3, pada tanggal 29 Juni 1950 dan diperkuat dengan surat keputusan Gubernur Kalimantan Nomor 186/OPB/92/14 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Agustus 1950 yang menjelaskan bahwa swapraja-swapraja di Kalimantan Timur diberi status sebagai daerah Istimewa setingkat Kabupaten, termasuk dalam hal ini Daerah istimewa Berau. Salah satu keputusan dalam surat tersebut adalah Sultan selaku pemegang kekuasaan di daerah-daerah swapraja (Kesultanan) secara otomatis diangkat menjadi kepala daerah Istimewa. Swapraja Berau yang meliputi kesultanan Sambaliung dan Gunung Tabur berganti nama menjadi daerah Istimewa Berau.



Balai Pelestarian Nilai Budaya
 Kesultanan Gunung Tabung sekarang menjadi Museum Batiwakkal
Kalimantan Barat



Bangunan Kesultanan Sambaliung

Daerah Istimewa Berau merupakan gabungan dari Kesultanan Gunung Tabur dan kesultanan Sambaliung. Daerah Istimewa Berau beribukota di Tanjung Redeb, bukan di keraton Sambaliung maupun Gunung Tabur, hal ini dikarenakan untuk menjaga netralitas bagi kedua kesultanan.

Dikeluarkannya Undang-Undang Darurat No.3/1953, yang mengatur tentang pembentukan daerah Swatantra ke II se Kalimantan. Daerah swapraja diganti menjadi Daerah istimewa. Wilayah kesultanan Sambaliung dan Gunung Tabur kemudian digabungkan menjadi Daerah Istimewa Berau. Karena Daerah Istimewa Berau terdiri dari dua kesultanan yang di gabungkan, maka dalam sistem pemerintahannya dijalankan secara bergantian antara sultan Gunung Tabur dan Sambaliung.

Pada awalnya Sultan Ayub yang merupakan Sultan dari Gunung Tabur ditunjuk menjadi kepala Daerah istimewa Berau, sedangkan untuk wakilnya di tunjuk Sultan Maulana yang merupakan pemimpin dari Sulnaan Sambaliung.

Berdasarkan Undang-Undang no.39 tahun 1950 daerah Istimewa berhak membentuk Dewan Pertimbangan Daerah Sementara (DPRD-S). Pada tahun 1956 Dewan Pertimbangan Daerah Sementara (DPRD-S) di rubah menjadi DPRD Dewan Pertimbangan Daerah Peralihan (DPRD-P). Keputusan ini berdasarkan pada di keluarkannya Undang-undang Nomor 14 tahun 1956 tentang pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah Otonom. Pemerintah Berau merespon dikeluarkannya undang-undang tersebut dengan mengganti Dewan Pertimbangan Daerah Sementara (DPRD-S) Berau di rubah menjadi Dewan Pertimbangan Daerah Peralihan (DPRD-P) Berau. Pembagian jumlah anggota Dewan Pertimbangan Daerah Peralihan(DPRD-P) telah di atur dalam peraturan menteri dalam negeri Nomor 12 Tahun 1956. Berdasarkan undang-undang tersebut maka Berau memiliki jumlah anggota DPRD-P yaitu 15 orang. Di wilayah Berau persebaran anggota Dewan Pertimbangan Daerah Peralihan(DPRD-P) dikuasai oleh 6 partai politik dengan Partai

Nahdlatul Ulama menjadi partai politik dengan jumlah anggota dewan paling banyak.

Berikut ini adalah komposisi anggota DPRDP; partai Nahdlatul ulama mendapat jatah 5 Kursi, Masyumi duduk di urutan kedua dengan 4 Kursi, partai Nasional Indonesia (PNI) berhasil meraih 2 kursi, perolehan ini sama dengan Partai Murba. Partai Sosialis Indonesia dan Partai Komunis Indonesia masing-masing berhasil menempatkan satu orang wakilnya untuk duduk dalam kursi Dewan Perwakilan Rakyat peralihan.

Adanya kewenangan untuk membentuk Dewan Pertimbangan Daerah Peralihan (DPRD-P) dimanfaatkan betul oleh masyarakat di Daerah Istimewa Berau untuk menyalurkan aspirasi politik mereka. Kalangan kesultanan, baik yang berasal dari Sambaliung maupun Gunung Tabur juga ikut ambil bagian dalam hal ini dan ini bisa dilihat dari banyaknya anggota dewan perwakilan daerah yang berasal dari keturunan sultan. Keterlibatan keluarga keraton dalam politik bisa dilihat dari aktifitas politik mereka yang tersebar di beberapa partai politik, baik partai yang berskala nasional seperti PNI, PNU, PKI, MURBA maupun mereka yang aktif di partai yang bersifat lokal seperti PERSARAD, bahkan ada yang ikut dalam pemilu mengatas namakan perorangan seperti yang di lakukan oleh A.M. Yusuf Aji. Peran elite keraton dalam percaturan politik tidak hanya di wilayah Daerah Istmewa Berau saja, tetapi ada yang sampai menembus level tingkat nasional. Aji Datu Norbek merupakan anggota keluarga keraton yang berhasil duduk di kursi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari Partai Nasionalis Indonesia (PNI).

Puteri Aji Kenik Berau Sanipah merupakan anak ketiga dari sultan Gunung Tabur yang ikut terjun dalam dunia politik. Sikap politik ini didasari akan perlunya keluarga keraton duduk di wilayah legislatif. Partai politik yang mengusung Adji Kenik Berau Sanipah adalah partai Nahdlatul Ulama PNU. Partai ini merupakan partai nasional memiliki beberapa ormas pendukung seperti; Persatuan Tani Nahdlatul Ulama, Serikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI), Gerakan Pemuda Ansor, Ikatan Pelajar

nahdlatul Ulama (IPNU), Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia (LESBUMI), Muslimat Nahdlatul Ulama, Serikat Nelayan Muslimin Indonesia, Serikat Buruh, Pegawai Daerah/SARBUMUSI (ABPD/SARBUMUSI).

Selain DPRD Peraliha ada juga Dewan Pemerintah Daerah (DPD). Dewan Pemerintah Daerah untuk wilayah Kalimantan Timur secara otomatis dikepalai oleh keluarga kerajaan. Sultan secara otomatis menjadi kepala Daerah Istimewa (KDI). DPD terdiri dari 6 (enam) orang, termasuk dalam hal ini adalah ketua dan wakil ketua. Anggota DPD dipilih oleh DPRD dari kalangan anggotanya. Khusus untuk wilayah Daerah Istimewa Berau maka jumlah anggota DPD yang di pilih dari anggota DPRD hanya 4 orang saja. Hal ini di karenakan ketua dan wakil ketua DPD diambil dari sultan Sambaliung dan sultan Gunung Tabur. Jabatan ketua dan wakil ketua dijabat secara bergantian oleh kedua sultan dengan tenggang waktu pergantian 2 tahun sekali. Pergantian kedudukan ini seperti yang terjadi dalam kedudukan sultan sebagai kepala dan wakil kepala daerah istimewa Berau. Ke empat anggota lain di pilih dari perwakilan DPRD yang ditunjuk dari partai NU, Masyumi, PNI dan Partai Murba.

— Pergantian di wilayah tingkat I berdampak pada daerah tingkat II. Kabupaten Berau yang semula adalah daerah Istimewa Berau juga melakukan perubahan dalam sistem pemerintahannya. Untuk menduduki jabatan bupati Berau, maka dipilahlah Adji Raden Muhammad Ajub yang sebelumnya menjabat sebagai kepala Daerah Istimewa Berau. Pengangkatan Adji Raden Muhammad Ajub sebagai bupati pertama Kabupaten Berau di tetapkan setelah mendapat persetujuan dari pusat dengan dasar surat keputusan menteri dalam negeri dan Otonomi Daerah No.UO/7/8/12-960 yang di tandatangani pada tanggal 7 April 1960. Upacara pelantikan Aji Raden Muhammad Ajub sebagai bupati dilaksanakan di Tanjung Redeb pada tanggal 9 Oktober 1960.

Berbagai ragam sikap keluarga kesultanan (Elite keraton) menghadapi perubahan pemerintahan yang terjadi di wilayah

Berau. Mereka ikut berpartisipasi dalam membangun Berau melalui keikutsertaan dalam lembaga legislatif. Kedua elite keraton, baik itu Kesultanan Sambaliung maupun Kesultanan Gunung Tabur, mereka ikut terlibat sebagai dalam pemerintahan di lembaga eksekutif (Pelaksana pemerintahan).

Keterlibatan elite dalam lembaga eksekutif mulai dari tingkat pemerintahan paling rendah sampai puncak pemerintahan di Daerah Istimewa Berau yaitu sebagai kepala daerah dan diangkatnya Sultan sebagai Kepala daerah Istimewa Berau, Hal ini dapat dilihat dari ketetapan yang mengatur bahwa Kepala Daerah Istimewa di jabat secara otomatis oleh Sultan secara bergantian.

Selain Sultan, ada beberapa orang elite yang ambil bagian di pemerintahan mulai dari tingkat kecamatan sampai ke kepala bagian. Mereka yang menduduki posisi camat, antara lain Datuk Panjalaman ditunjuk menjadi camat di kecamatan Tanjung Redep yang merupakan ibukota Daerah Istimewa Berau. Aji Raden Abdurrahman pernah menjabat menjadi camat di kecamatan Pulau Derawan, dan setelah itu dipindah tugaskan ke kecamatan di Sambaliung.

Selain A.R Abdurrahman, ada juga kerabat keraton yang ditunjuk sebagai camat, dia adalah anggota kerajaan dari Gunung Tabur yaitu Adji Raden Muhammad Hasan. Ia ditunjuk menjadi camat di kecamatan Pulau Derawan menggantikan posisi A.R Abdurrahman yang dipindah tugaskan ke Sambaliung.

Peran Keluarga Keraton baik itu Sambaliung maupun Gunung Tabur di dalam birokrasi pemerintahan Berau sangat strategis dan berpengaruh. Selain sebagai camat ada juga elite yang duduk sebagai kepala bagian.

Ada beberapa kepala bagian yang di duduki oleh keluarga besar kesultanan da menempati posisi bagian yang strategis seperti bagian perusahaan air minum, ekonomi, pariwisata, bahkan jabatan kepala pemerintahan pun di pimpin oleh keluarga keraton. Adji Iskandar menjabat sebagai Kepala Bagian Perusahaan Air Minum, Adji Bahrul duduk sebagai Kepala Bagian Pariwisata, Kepala bagian Ekonomi diserahkan kepada Raden Cokro, Adji Atap ikut

dalam badan pemerintahan, Sementara R. Sosro Kepala bagian Asing yang bertugas menangani urusan yang terkait dengan hubungan pemerintah dengan pihak luar birokrasi.

Sultan Ahmad Maulana Muhammad Chalifatullah Jalaluddin, Sultan Gunung Tabur yang memerintah dari tahun 1921-1952 memiliki 4 (empat) orang anak, yang terdiri dari tiga orang puteri dan satu putera. Mereka adalah Hj. Aji Puteri Nurul Hayati Puteri, Hj.Aji Puteri Nurul Aini, Hj. Aji Puteri Kanik Berau Sanipah dan anak terakhir laki-laki yang bernama Raden Muda Badaruzzaman. putera mahkota. Sebagai putera mahkota, RM. Badaruzzaman tidak sampai memangku jabatan karena beliau diserang penyakit yang mengakibatkan beliau meninggal dunia pada usia muda.

Sebagai puteri keraton, Hj. Aji Puteri Kenik Berau Sanipah termasuk orang yang aktif dalam kegiatan pemerintahan di Berau. Ia menjadi salah seorang perempuan Berau yang berhasil menduduki jabatan legislatif. Ia duduk di kursi DPRD-S sejak pertama dibentuk DPRD pada masa Berau masih ditetapkan sebagai daerah istimewa. Selain sebagai wakil rakyat di DPRD, Hj. Aji Puteri Kenik Berau Sanipah bersama-sama dengan kakaknya, Hj.Aji Puteri Nurul Aini mendirikan suatu organisasi sosial yang bernama Yayasan IDA (Ibu dan Anak).

Balai Pelestarian Nilai Budaya



Yayasan Ibu dan Anah yang dipimpin oleh Hj.Aji Puteri Nurul Aini, Hj. Aji Puteri Kanik Berau Sanipah (sumber Foto Keraton Gunung Tabur)

Keterlibatan keluarga keraton, baik kesultanan Sambaliung maupun Gunung Tabur dalam pemerintahan tidak hanya di bidang eksekutif dan legislatif saja, mereka juga bergerak dalam bidang sosial. Yayasan Ibu dan Anak (IDA) merupakan salah satu yayasan yang bergerak di bidang pendampingan terhadap kaum perempuan di Berau. Hj.Aji Puteri Nurul Aini saat itu di tunjuk sebagai ketua yayasan IDA. Puteri dan masyarakat melakukan sosialisasi dan pendampingan terhadap kaum perempuan, baik itu pemberian informasi terhadap wanita yang sedang hamil, melahirkan dan menyusui.



Hj.Aji Puteri Nurul Aini dan Hj. Aji Puteri Kanik Berau Sanipah

D. Dampak Perubahan bagi Golongan Elite

Surat keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor C 17/15/3, pada tanggal 29 Juni 1950 dan diperkuat dengan surat keputusan Gubernur Kalimantan Nomor 186/OPB/92/14 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Agustus 1950 yang menjelaskan bahwa swapraja-swapraja di Kalimantan Timur diberi status sebagai daerah Istmewa setingkat Kabupaten. Sultan secara otomatis diangkat menjadi kepala daerah Istimewa. Perubahan status Sultan dalam pemerintahan berdampak juga terhadap keluarga dan kalangan Istana.

Kesultanan Gunung Tabur dan Kesultanan Sambaliung bergabung menjadi Daerah Istimewa Berau. Perubahan Status ini berdampak pula pada kalangan keluarga dan ahli waris kedua kesultanan. Adanya pergantian sistem pemerintahan dari sistem kerajaan ke daerah Istimewa membuat kekuasaan keluarga pihak keraton berkurang, bahkan dalam pemerintahan, pihak keraton sudah tidak memiliki kekuasaan.

Terjadinya perubahan sistem, dari yang lama kepada sistem pemerintah yang baru, berdampak pada perubahan struktur yang ada di dalam masyarakat. Jika selama ini pemerintahan keraton di bawah kekuasaan kesultanan, maka pemerintahan sekarang lebih mengarah kepada pemerintahan yang modern dan menerapkan adanya lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam pemerintahan. Lembaga ini adalah sebagai mitra pemerintah dalam mengatur wilayah kekuasaannya.

Sistem pemerintahan yang berubah berdampak juga pada kalangan kesultanan (elite keraton), karena mereka telah ikut dalam pemerintahan yang baru yaitu Daerah Istimewa Berau. Mereka tersebar tidak hanya di pemerintahan (eksekutif) saja, tetapi banyak di antara mereka yang ikut menjadi peserta pemilu dan bahkan ada yang berhasil menjadi anggota dewan. Kalangan istana bahkan ada yang menjadi polisi, tentara dan bahkan ada yang mendirikan lembaga sosial.

Ada beberapa keluarga keraton yang duduk dalam pemerintahan (eksekutif), mereka memegang peran mulai dari tingkat terendah tingkat kecamatan sampai ke tingkat tertinggi, yaitu sebagai Bupati Daerah Istimewa Berau. Peran elite keraton dalam pemerintahan Daerah Istimewa Berau tidak hanya dalam hal pemerintahan saja, tetapi mereka juga ikut dalam badan Legislatif di DPRD. Keterlibatan mereka dalam lembaga legislatif salah satunya bisat dilihat dari keterlibatan mereka dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Berau pada tahun 1957.

Pemilihan umum tahun 1957 merupakan salah satu cara bagi keluarga keraton untuk merintis kembali peran mereka dalam system pemerintahan di Berau. Hal ini dapat dilihat dari tingginya

antusiasme keluarga keraton, baik itu keraton Sambaliung maupun Gunung Tabur ikut masuk dalam daftar calon tetap Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 1957 Daerah Istimewa Berau.

Pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) daerah istimewa Berau di ikuti oleh beberapa partai politik, baik partai politik yang bersifat nasional, daerah bahkan dalam pemilu tersebut perorangan di perbolehkan ikut menjadi peserta pemilihan umum. Berdasarkan data yang di peroleh dari Lembar Propinsi Kalimantan Timur No.1 tahun 1958 halaman 30 di jelaskan ada beberapa partai politik yang masuk dalam daftar calon tetap pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat daerah tahun 1957 Daerah Istimewa Berau.

Peserta yang ikut dalam pemilu tahun 1957 antara lain; Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), Datu Kemat Dkk, A.M. Yusuf Dkk, rukun Kampung Pulau Derawan, Partai Murba, Persatuan Rakyat Daerah (PERSARAD), Madjelis Sjurja Muslimin Indonesia (MASYUMI), Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Komunia Indonesia (PKI), Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Sosialis Indonesia (P.S.I), perseorangan Adji Raden Abdurachman, Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia (P.P.P.R.I), Baperki, Gerakan Pembela Pantjasila.

Banyak keluarga keraton, baik dari Sambaliung maupun Gunung Tabur yang ikut tampil sebagai peserta dalam pesta demokrasi saat itu. Keluarga keraton tidak hanya masuk dalam daftar calon tetap saja, tetapi mereka juga ikut terlibat dalam pendirian partai lokal. Partai lokal tersebut misalnya PERSARAD (Persatuan Rakyat Daerah) yang menempati nomor urut 9 dalam pemili DPRD tahun 1957, Datu Kemat Dkk nomor urut 2, A.M Yusuf dkk nomor urut 4.

Ada beberapa keluarga keraton baik itu Keraton Sambaliung maupun Gunung Tabur yang duduk dalam lembaga legislatif. Mereka tidak hanya duduk di DPRD Berau saja, tetapi ada yang berhasil mewakili wilayah Kalimantan Timur duduk di kursi

Majelis Permusyawaratan Rakyat RI. Aji Datuk Norbek adalah salah seorang dari keluarga Keraton Gunung Tabur.

Pemilihan anggota Dewan Perwakilan rakyat daerah peralihan Daerah Istimewa Berau dilaksanakan pada tahun 1958. Pemungutan suara dilaksanakan pada 17 Februari 1958 sampai dengan 24 Mei 1958. Pemilihan umum ini berdasarkan peraturan daerah istimewa Berau No. 21/DPRDP/1957.

Berikut ini beberapa nama keluarga keraton, baik dari Gunung Tabur maupun dari Sambaliung yang tercantum dalam calon tetap dalam pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) daerah tahun 1957 Daerah Istimewa Berau. Partai Sarekat Islam Indonesia (P.S.I.I) yang menempati nomor urut pertama dalam pemilihan umum merupakan partai terbanyak yang melibatkan pihak keluarga kesultanan dalam daftar calon anggota DPRD. Dari 10 kader yang di masukkan dalam daftar calon tetap peserta pemilu, PSII menempatkan 7 orang yang merupakan keturunan bangsawan Berau.

Diikutsertakannya pihak kesultanan dalam pemilihan umum diharapkan dapat menarik simpati masyarakat Daerah Istimewa Berau (DIB) yang diyakini masih menaruh simpati pada pihak kesultanan.

Pihak keluarga kesultanan baik Sambaliung maupun Gunung Tabur yang dilibatkan dalam usaha menarik simpati masyarakat Berau dalam pemilu untuk memilih P.S.I.I. Adji Kasan Ahmad Elkiflie yang berasal dari Talisajan merupakan keluarga kerajaan Sambaliung yang menempati nomor urut pertama. Dari kesultanan Sambaliung tidak hanya Adji Kasan Ahmad Elkiflie tetapi ada juga Adji Raden Perbatasari, Achmad bin Adji miruddin Adji Parsie bin Raden Bangsawan Adji Pernoto. Mohammad Djamaluddin bin Adji Anum merupakan keluarga bangsawan keraton yang mewakili P.S.I.I untuk wilayah Tanjung Redeb yang merupakan ibukota Daerah Istimewa Berau, sedangkan Mansjhur Adji Raden Bandara merupakan wakil dari Sultan Tengah.

Organisasi masyarakat yang ada dalam Partai Serikat Islam Indonesia (PSII) antara lain Gerakan Organisasi Buruh Serikat

Islam (GOBRI), Pemuda Muslimin Indonesia (PMI), Wanita R.S.I.I, Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI), Gerakan Tani Serikat Islam (GTSI)

Datu Kemat dan kawan-kawan merupakan utusan perorangan yang ikut dalam pemilihan umum di Daerah Istimewa Berau. Dalam pemilihan umum Datu Kemat dkk menempati nomor urut ke dua.

Adapun daftar calon tetap yang diajukan dari keluarga keraton adalah Datu Kemat bin Sultan Muhammad Aminuddin dan Sjahran bin Adji Dewangsa. Keduanya berasal dari kesultanan Sambaliung. Selain Datu Kemat Dkk, A.M Jusuf bin Datu Adji Kuning dari kesultanan Sambaliung juga menjadi salah seorang peserta perorangan yang ikut ambil bagian dalam pesta demokrasi. A.M. Jusuf dan kawan-kawan mendapat nomor urut ke empat dalam daftar calon tetap peserta pemilu DPRD DIB.



Puteri Aji Kenik Berau Sanifah merupakan Puteri dari dari Sultan Ahmad Maulana Muhammad Chalifatullah Jalaluddin (1921-1952) yang menjadi anggota DPRD DIB.

Persatuan Rakyat Daerah (PERSARAD) merupakan partai lokal yang ikut dalam pemilu dalam rangka memperebutkan kursi wakil rakyat yang duduk di DPRD DIB. Dalam daftar peserta

pemilu, partai berlambang rumpun bambu ini mendapat Nomor urut 9.

PERSARAD sebagai partai lokal melibatkan keluarga keraton dalam usaha menarik simpatik warga untuk memilih. Hal ini bisa dilihat dari 8 (delapan) dari 9 (sembilan) calon anggota dewan yang berasal dari keluarga keraton, dan di dominasi oleh keluarga besar keraton Gunung Tabur.

Salah satu usaha yang dilakukan adalah dengan merekrut dan memasukan salah seorang putri Sultan Gunung Tabur dalam daftar calon anggota DPRD DIB. Adji Kenik Berau Sanifah merupakan anak dari Sultan Gunung Tabur yang menjadi kader dan calon tetap DPRD DIB. Selain Adji Kenik Berau Sanifah dari keluarga kesultanan Sambaliung juga telah bergabung masuk daftar calon anggota DPRD DIB Mas Perwiro, Raden Sosro Abdul Kadir dan Adji Putera. Adji Mas Natadjaja juga keluarga keraton, tetapi ia mewakili wilayah Tanjung Redeb. Partai peserta pemilu nomor urut 10 adalah MASJUMI ; (1) Adji Raden Perwiro (Sambaliung), (2) Humrun Bin Adji Raden Perwiro (Sambaliung), dan (3) Adji Panglima Kahar (Batu-batu).

Partai Nasional Indonesia (PNI) merupakan salah satu partai terbesar saat itu di tingkat nasional. Sebagai partai yang besar PNI memiliki beberapa ormas yang berafiliasi dengannya. Ormas yang bergabung dengan PNI antara lain; Kesatuan Buruh Marheinis (KBM), Persatuan Tani Nasional Indonesia (Petani), Gerakan Pemuda Marheanis, Gerakan Nelayan Marheinis, Ikatan Pamong Republik Indonesia, banteng Muda, Gerakan Wanita Marheinis, Djamiatul Muslimin, Lembaga Budaya Indonesia, Gerakan Siswa nasional Indonesia (GSNI), Gerakan Mahasiswa nasional Indonesia (GMNI), Ikatan sarjana Nasional Indonesia (ISRI), Gerakan Pendidik Marheinis.

Dalam pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah tahun 1957 Daerah Istimewa Berau, PNI ikut berpartisipasi dan menempati Nomor urut 11. Dalam pemilu ini PNI menempatkan 8 orang kadernya masuk dalam daftar calon tetap peserta pemilu. Diantara kedelapan calon yang di usung oleh PNI ada satu kader

yang merupakan anggota keluarga kesultanan Gunung Tabur yaitu Adji Prabu Samsudin Apuk.

Partai Komunis Indonesia (PKI) merupakan satu-satunya partai Komunis yang ikut dalam pemilihan umum di wilayah daerah Istimewa Berau. Dalam daftar pemilihan, PKI mendapat nomor urut 11. Dari 10 daftar calon tetap anggota DPR yang diajukan oleh PKI 1(satu) diantaranya adalah anggota kesultanan dari Gunung Tabur. Adji Raden Natadjaja merupakan keturunan sultan Gunung Tabur yang maju menjadi calon anggota DPR mewakili wilayah Teluk Bayur. (Sumber : Lembar Propinsi Kalimantan Timur No.1 tahun 1958)



**Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat**

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Sejak dahulu wilayah Berau sudah dikenal oleh dunia luar terlebih bangsa asing yang ingin menguasainya. Kekayaan alam dan bumi yang melimpah menjadi salah satu daya tarik. Selain kerajaan Berau, masih ada kerajaan lain di Kalimantan Timur yaitu kerajaan Kutai, Bulungan, Sambaliung dan Gunung Tabur dan keempat kerajaan tersebut diberi hak untuk memerintah sendiri (*zelfbestuur*) dan dari dua kerajaan tersebut dua terdapat di Berau yaitu Kesultanan Gunung Tabur dan Kesultanan Sambaliung. Sistem pemerintahan di kedua kesultanan ini dahulu dilaksanakan secara bergantian dan hal ini tentu menimbulkan ketidak harmonisan dalam kerajaan.

Kedua kesultanan di Berau hingga saat ini masih dapat dijumpai situs dan peninggalannya dan bahkan kerabat kesultanan yang masih tinggal di keraton. Mereka adalah Hj. Aji Puteri Nurul Aini dan Hj. Aji Puteri Kanik Sanifah, puteri dari Sultan Gunung Tabur Sultan Ahmad Maulana Muhammad Chalifah Jalaluddin. Keadaan kedua puteri saat ini (tahun 2014) sudah berusia 93 tahun dan Hj. Aji Puteri Nurul Aini sedang sakit.

Sebelum masa kemerdekaan, Kesultanan di Berau dipimpin oleh Sultan dan mereka dianggap sebagai elite lokal yang berkuasa. Elite ini bertugas untuk mengatur wilayahnya, sehingga sewaktu kedatangan bangsa asing baik itu Belanda dan Jepang, penguasa lokal ini yang lebih dahulu dijumpai guna memperoleh ijin masuk wilayahnya.

Namun, kekuasaan elite lokal dibatasi dan tidak bebas karena campur tangan pihak asing lebih dominan dan sangat berpengaruh dalam pemerintahan wilayah. Demikian pula pada masa Jepang,

pemerintahannya masih menggunakan yang berlaku pada masa Belanda hanya istilah dalam pemerintahan saja yang berubah. Kehidupan rakyat pada masa Jepang/sebelum kemerdekaan di Berau sangat prihatin, mereka hanya dijadikan sebagai objek kekuasaan.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa bahwa perkembangan masalah ketatanegaraan Indonesia masa revolusi sangat erat kaitannya dengan kehadiran kekuatan asing. Indonesia mengalami perubahan bentuk negara dari kesatuan menjadi negara federal bukan saja disebabkan oleh faktor dalam negeri, tetapi ada hubungannya dengan kehadiran Belanda dan Australia.

Kuatnya keinginan Belanda sebagai negara koloni untuk mempertahankan pengaruh dan kekuasaannya di Indonesia membuat negara ini sempat mengalami perubahan bentuk negara. Selain itu, masih ada satu faktor lagi yaitu adanya sebagian kecil masyarakat Indonesia yang merasa lebih nyaman dan tenang di bawah payung kolonial Belanda membuat ide negara federal dapat hidup dan bertahan.

Kehadiran pasukan Belanda dengan kekuatan yang lebih besar dibandingkan dengan militer Indonesia, yang terdiri dari tenaga baru yaitu para pemuda pejuang. Mereka inilah yang menjadikan pendukung ide negara federal di beberapa tempat. Oleh karena itulah, negara federal dalam bentuk Republik Indonesia Serikat (RIS) sempat terwujud melalui Konferensi Meja Bundar (KMB), meskipun tidak dapat bertahan lama.

Terjadinya perubahan dari negara federal menjadi negara kesatuan tidak dapat disangkal disebabkan dukungan politik dari masyarakat Indonesia terhadap ide negara federal yang sesungguhnya sangat lemah. Ide negara federal muncul dari ambisi politik orang-orang Belanda yang agaknya takut terhadap negerinya jika tidak lagi mempunyai peran di Asia.

Oleh karena itulah ketika masalah kemerdekaan Indonesia sudah tidak dapat ditawarkan lagi, mereka memperkenalkan ide mengenai pembentukan negara federal. Akan tetapi, ide-ide tersebut hanya didukung oleh sebagian kecil masyarakat Indonesia, yaitu

mereka yang pernah merasakan nikmatnya hidup dalam lindungan kekuasaan kolonial Belanda. Hal itu terbukti ketika sebagian besar pasukan Belanda mulai ditarik dari Indonesia. Bersamaan dengan itu dibebaskannya tahanan politik yang sebagian besar merupakan elite politik pro-republik membuat desakan masyarakat untuk mengganti negara federal kepada bentuk negara kesatuan semakin kuat. Dengan demikian jatuhnya negara federal tinggal menunggu waktu setelah situasi politik di Indonesia benar-benar berubah.

B. Saran

- Penulisan terhadap tema-tema sejarah yang bersifat lokal perlu mendapat perhatian dari semua pihak, baik itu oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Keberhasilan sebuah penulisan perlu adanya kerjasama yang baik sehingga data dan informasi tentang masa lalu dapat dihimpun menjadi sebuah dokumentasi yang baik.
- Masa lalu berupa pengalaman tentu banyak memberikan pelajaran. Keburukan dan kelemahan masa lalu dapat ditelusuri faktor penyebabnya sehingga tidak terulang dalam langkah selanjutnya.
- Pemeliharaan terhadap situs dan peninggalan sejarah masa lalu perlu mendapat perhatian baik itu berupa dukungan moril dan materiel.
- Kesultanan Gunung Tabur dan Kesultanan Sambaliung di Berau merupakan bukti dari pemerintahan tradisional yang pernah ada dan para elite lokal berperan di dalamnya. Oleh karenanya, kedua kesultanan ini perlu dibina dan digali tentang sejarah dan budayanya. Penghimpunan data dapat dilakukan dari beberapa sumber, baik itu terhadap narasumber yang masih dapat mengungkapkan tentang masa lalunya, sumber data (dokumen/arsip) dan data penunjang lainnya. Oleh karena itu perlu adanya kerjasama yang baik.



**Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat**

DAFTAR PUSTAKA

- Adriansyah. Anang, 1982. *Berau tempo doeloe dan masa kini*, laporan yang belum diterbitkan
- Achmad Maulana, Drs.H, 2011. *Buku Petunjuk Museum Batiwakal Gunung Tabur*. Museum Daerah Kabupaten Berau
.....2011. *Sejarah daerah Berau*, Tanjung Redeb.
- Agung, Ida Anak Agung Gde 1985. *Dari Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Agung, Ida Anak Agung Gde 1985. *Dari Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,
- Depdikbud, 1977/1978, *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Kalimantan Timur*, Pusat Penelitian Sejarah Dan Budaya. Proyek Penelitian Dan Pencatatan Kebudayaan Daerah.
-----, 1981/1982, *Sejarah pengaruh Pelita Terhadap Masyarakat Pedesaan Kalimantan Timur*.
- Faith, Herbert . 1962. *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. New York: Ithaca
- Kahin, M. George 2013. *Nasionalisme dan Revolusi. Indonesia. Terjemahan TKomunitas Bambu* Jakarta.
- Faith, Herbert . 1962. *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. New York: Ithaca,
Kedaulatan Rakyat, 21 Januari 1950.
Kedaulatan Rakyat, 17 Desember 1950
Kedaulatan Rakyat, 20 Desember 1949
- Kartodirjo, Sartono. 1975. *Sejarah Nasional Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

- Klinken, Geri, V. 2010. *Adat Dalam Politik Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Langenberg, Michael.V. 1990. Sumatera Timur: Mewadahi Bangsa Indonesia dalam Sebuah Karesidenan di Sumatera Timur", dalam Audery Kahin, *Pergolakan Daerah Pada Awal Kemerdekaan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
- Langenberg, Michael. V. 1982. "Class and Etnic Confliv in Indonesia's Decolonization Process: A Study Case of East Sumatra" in *Indonesia XXXIII*.
- Moedjanto, G. 1988. *Indonesia Abad ke-20 II* . Yogyakarta: Kanisius.
- Nalenan, R . 1981. *Arnold Mononutu: Potret Seorang Patriot* . Jakarta: Gunung Agung.
- Oemar Dahlan, 2006, *Sekelumit Sejarah Kalimantan Timur Dalam Bidang Pemerintahan*. Biro Hubungan Masyarakat Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur.
- Puba,Juniar, 2002, *Oemar Dahlan, Tokoh Pers di kalimantan Timur*. Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional. Pontianak.
- Profil Kabupaten Berau, Peluang dan Tantangan Era Abad ke 21, Penerbit CV Maruhum
- Pemda Tingkat I Kaltim, 1992, *Sejarah pemerintahan Di Kalimantan Timur Dari Masa Ke Masa*.
- Lembaran Propinsi Kalimantan Timur, No 1 Tahun 1957, 30 Juli 1957
- Lembaran Propinsi Kalimantan Timur, No2 Tahun 1957, 20 September 1957
- Lembaran Propinsi Kalimantan Timur, No 3 Tahun 1957
- Lembaran Propinsi Kalimantan Timur, No 2 Tahun 1958
- Lembaran Propinsi Kalimantan Timur, No 3 Tahun 1958
- Lembaran Propinsi Kalimantan Timur, No 4 Tahun 1958
- Lembaran Propinsi Kalimantan Timur, No 2/3 Tahun 1959
- Lembaran Propinsi Kalimantan Timur, No 6/7Tahun 1959
- Lembaran Propinsi Kalimantan Timur, No 1 Tahun 1960

- Said Mohammad. 1946. *Empat Belas Boelan Pendoedoekan Inggris di Indonesia*. Medan: Berita Antara.
- Sewaka, 1955. *Tjorat-Tjoret dari Jaman ke Jaman*. Bandung: Visser.
- Sjamsudin, Heliuss. 2013. *Perlawanan dan Perubahan Kalimantan Barat Kerajaan Sintang 1822-1942*. Yogyakarta: Ombak
- Sjamsudin, Heliuss. 1992. *Menuju Negara Kesatuan: Negara Pasundan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Sutherland, Heater. (alih Bahasa Sunarto). 1979. *Terbentuknya Sebuah Elit Birokrasi*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Suprpto, Agus dkk, 1995. *Sejarah Pergerakan Dan Revolusi Kemerdekaan Rakyat Samarinda*. Yayasan Olah Bebaya. Samarinda.
- Swasono, Meutia. F. 1980. *Bung Hatta, Pribadinya dalam Kenangan*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Tanu Suherly, Tanu. 1970. *Sekitar Negara Pasundan, Naskah Seminar Sejarah Nasional II Yogyakarta*
- Zuhro.R.Siti. 2009. *Demokrasi Local Perubahan Dan Kesiambungan Nilai-Nilai Budaya Politik Local di Jawa timur, Sumatera barat, Sulawesi Selatan, dan Bali*. Yogyakarta: Ombak
-
- Zuhro, R.Siti. *demokrasi Lokal: Peran Aktor Dalam Demokratisasi*. Yogyakarta: Ombak

Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat

DAFTAR INFORMAN

No	Nama / umur	Pekerjaan	Alamat
1	Dt Fachrudin (70 thn)	Pensiunan Polisi, Pemangku Adat, Kesultanan Sambaliung	Jl Aminuddin, Berau
2	Abdullah (51 thn)	Seniman	Jl Milono, Kab Berau
3	Naharsiah (70 thn)	Pensiunan Guru	Kec.Teluk Bayur. Kab Berau
4	H.Aji Rahmatsyah (78 thn)	Swasta	Jl Kampung Cina. Kec Teluk Bayur. Berau
5	Asrul Sani (74 thn)	Pensiunan Guru	Kec.Teluk Bayur. Berau
6	Ahmad Maulana (75 thn)	Pensiunan PNS	Berau
7	Sapruddin Ithur	PNS (Ka bidang Kebu dayaan)	Berau
8	Hj.Aji Putri Kanik Sanipah (93 thn)	Puteri Kesultanan Gn Tabur	Kesultanan Gunung Tabur
9	Mulyati (48 thn)	Kasi Kesejarahan, Disbudpora	Berau
10	Takarianto (52 thn)	Pemkab Berau	Berau
11	R. Simamora (64 thn)	Pensiunan AD	Berau
12	Syahrani (52thn)	Pemkab Berau	Berau

FOTO PENELITIAN



Bandar Udara Kalimantan di Berau

Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Berau



Kantor Bupati Berau, Tanjung Redeb



Tim Bersama Wakil Bupati Berau



Tim bersama Kabid Kebudayaan dan staff di Dispora Berau



Tim sedang wawancara di kediaman Bapak Ahmad Maulana. Berau



Basuki, Yuver, Puteri Kanik dan Juniar Purba di Kesultanan Gunung Tabur.



Juniar, Pak Aji Rahmatsyah, Yuver dan Basuki di Kec. Teluk Bayur. Berau



Tim menuju Pulau Derawan



**Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat**

ELITE DALAM STRUKTUR POLITIK DI BERAU (1942-1959)

Sebelum masa kemerdekaan, Kesultanan di Berau dipimpin oleh Sultan dan mereka dianggap sebagai elite lokal yang berkuasa. Elite ini bertugas untuk mengatur wilayahnya, sehingga sewaktu kedatangan bangsa asing baik itu Belanda dan Jepang, penguasa lokal ini yang lebih dahulu dijumpai guna memperoleh ijin masuk wilayahnya.

Namun, kekuasaan elite lokal dibatasi dan tidak bebas karena campur tangan pihak asing lebih dominan dan sangat berpengaruh dalam pemerintahan wilayah. Demikian pula pada masa Jepang, pemerintahannya masih menggunakan yang berlaku pada masa Belanda hanya istilah dalam pemerintahan saja yang berubah. Kehidupan rakyat pada masa Jepang/sebelum kemerdekaan di Berau sangat prihatin, mereka hanya dijadikan sebagai objek kekuasaan.

Kalimantan Barat



Penerbit Kepel Press
Puri Arsita A-6
Jl. Kalimantan, Ringroad Utara, Yogyakarta
Telepon: 0274-884500, 081-227-10912
e-mail: amara_books@yahoo.com



BPNB Ponjanak

ISBN 978-602-1



9 786021 228913

KTI - 95